

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR 761/DJPDSPKP.1/HK.170/II/2026

Yth. : Ketua Tim Kerja Program
Dari : Ketua Tim Kerja Hukum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan
Tanggal : 25 Februari 2026

Sehubungan telah ditandatanganinya Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 94 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.

Bersama ini kami lampirkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal dimaksud untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Gunawan Widiarto



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAM www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 94 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, perlu menyusun rencana strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 905);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2025

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Ttd.

MACHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal,


Machmud

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 94 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025 – 2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pada program pembangunan yang telah dilaksanakan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sudah mendukung sepenuhnya arah pembangunan nasional bidang kelautan dan perikanan serta target capaian program secara langsung maupun tidak langsung berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Beberapa kondisi yang telah tercipta hingga tahun 2024 melalui implementasi program pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Implementasi program pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan

1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan

Tahun 2023 menjadi titik balik dengan pertumbuhan yang kembali menguat ke angka 5,49%, melebihi target yang dipatok sebesar 4%.

Memasuki tahun 2024, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan baru mencapai 0,68%, jauh dibawah target sebesar 4%. Beberapa faktor penyebabnya adalah cuaca ekstrem, banjir di sentra-sentra produksi seperti Sumatera Utara, Jambi, dan wilayah Pantura (KKP, 2024 BMKG, 2024). Meskipun demikian, sektor budi daya tetap memberikan kontribusi positif, dengan pertumbuhan komoditas utama seperti ikan dan rumput laut, meski dalam skala terbatas. PDB periode 2020–2024 secara keseluruhan menunjukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif pada sektor perikanan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan ketahanan sistem produksi terhadap krisis dan gangguan iklim, peningkatan efisiensi program nasional, serta dorongan pada modernisasi dan hilirisasi industri perikanan.

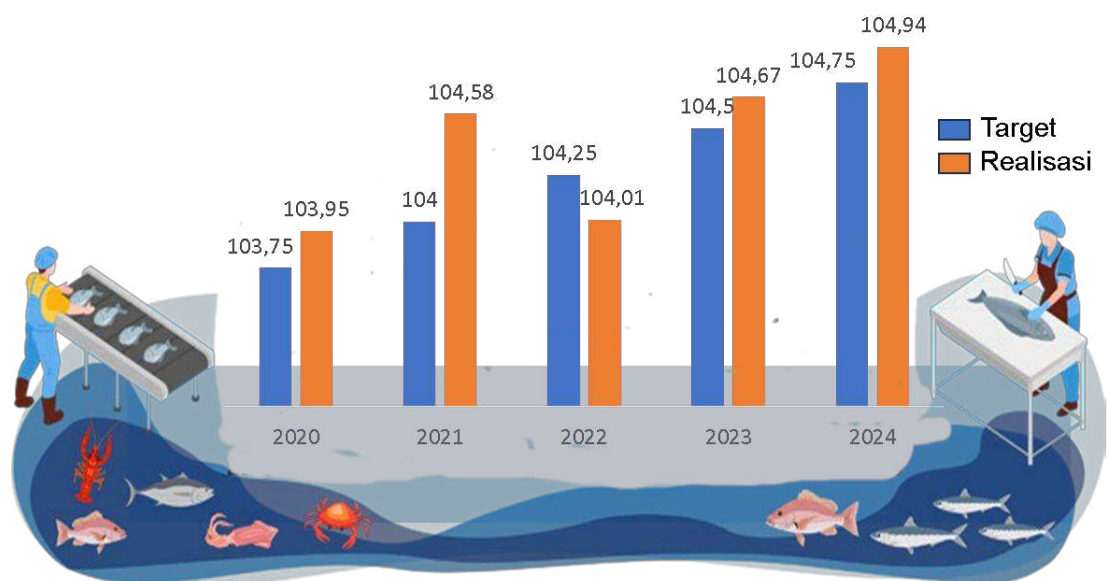


Gambar 1.2. Capaian pertumbuhan PDB perikanan

2. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan tukar produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan oleh rumah tangga pengolah terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan, baik untuk keperluan konsumsi rumah tangga maupun untuk proses produksi pengolahan itu sendiri. Melalui capaian NTPHP, dapat diukur tingkat daya saing produk olahan hasil perikanan dibandingkan dengan produk lain, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan produk unggulan wilayah yang berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu, NTPHP juga menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh rumah tangga pengolah hasil perikanan dengan indeks harga yang mereka bayarkan. Dengan demikian, NTPHP tidak hanya merefleksikan kesejahteraan pelaku pengolahan ikan, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan penguatan daya saing produk perikanan di tingkat rumah tangga pengolah.



Gambar 1.3. Capaian nilai tukar pengolah hasil perikanan (NTPHP)

Pada tahun 2024, realisasi NTPHP tercatat sebesar 104,94, atau setara dengan 100,18% dari target tahun 2024 dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 104,75. Capaian ini menunjukkan peningkatan daya saing produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan oleh rumah tangga pengolah. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 104,67 (100,16% dari target 104,50), terjadi pertumbuhan NTPHP sebesar 0,26%, dengan capaian target meningkat sebesar 0,22%.

Data NTPHP ini mewakili kondisi rumah tangga pengolah ikan skala mikro dan kecil yang tersebar di 40 kabupaten/kota pada 5 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Enam jenis pengolahan yang dicakup dalam pengukuran ini meliputi penggaraman/pengeringan, pemanggangan/pengasapan, fermentasi, pelumatan daging ikan, pemindangan, dan pengolahan lainnya. Penentuan lokasi sampel mengacu pada data Diagram Timbang (DT) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, sehingga hasil pengukuran NTPHP dapat memberikan gambaran yang representatif terhadap kondisi rumah tangga pengolah ikan di Indonesia.

Capaian NTPHP yang positif ini sekaligus menjadi bukti bahwa upaya penguatan daya saing produk olahan hasil perikanan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan akses pasar telah menunjukkan hasil yang nyata di tingkat rumah tangga pengolah.

3. Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Pada tahun 2024, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai USD 5,95 Miliar (Rp 94,28 Triliun) atau naik 5,69% dibanding tahun 2023. Nilai impor tahun 2024 mencapai USD 522,05 Juta (Rp 8,27 Triliun) atau sekitar 8,77% terhadap nilai ekspor, sehingga mengukuhkan

Indonesia sebagai negara *net exporter* produk perikanan. Pada tahun 2024, neraca perdagangan produk perikanan mengalami surplus sebesar USD 5,43 Miliar (Rp 86,01 Triliun) atau naik 9,07% dibanding tahun sebelumnya.



Gambar 1.4. Kinerja ekspor produk perikanan



Gambar 1.5. Pasar Komoditas Utama Produk Perikanan Indonesia

Pada periode Januari-Desember 2024, negara tujuan ekspor utama, yaitu: Amerika Serikat (AS) dengan nilai USD 1,90 miliar (32,0% dari total nilai ekspor perikanan Indonesia), diikuti oleh Tiongkok USD 1,24 miliar (20,9%), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) USD 856,87 juta

(14,4%), Jepang USD 598,75 juta (10,1%), dan Uni Eropa USD 414,36 juta (7,0%).

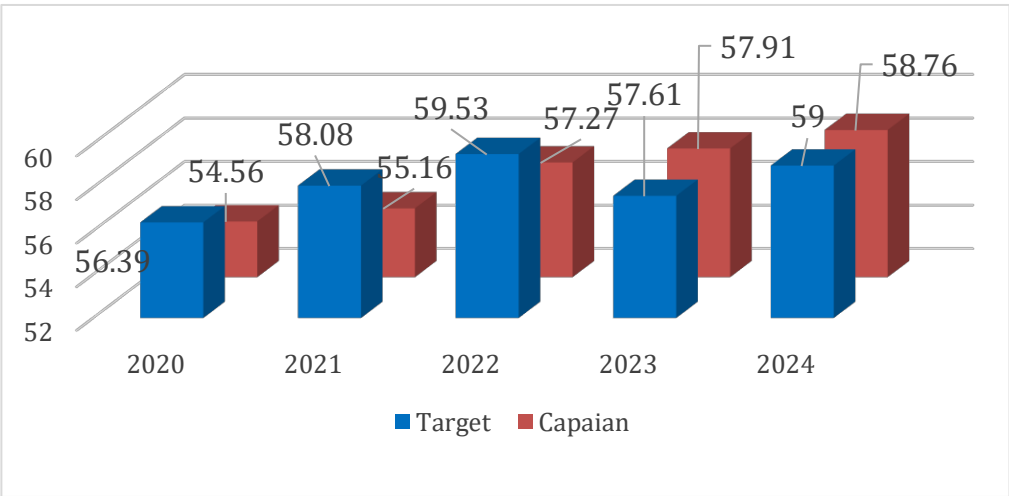
Beberapa negara tujuan ekspor yang berkontribusi besar terhadap meningkatnya ekspor Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya antara lain:

- a) ASEAN (28,3%) dengan kontribusi terbesar pada komoditas cumi-sotong-gurita, tuna-cakalang, lobster, dan rajungan-kepiting. Peningkatan ekspor secara signifikan khususnya pada pasar Vietnam sebesar 62,4% dan Thailand 40,3%;
- b) Tiongkok (9,2%) dengan kontribusi terbesar pada komoditas layur-gulama, lobster, rajungan-kepiting, cumi-sotong-gurita, dan tuna-cakalang; dan
- c) Uni Eropa (23,6%) dengan kontribusi terbesar pada komoditas tuna-cakalang, cumi-sotong-gurita, udang, dan rumput laut.

Komoditas utama ekspor Indonesia meliputi udang USD 1,68 miliar (28,2% terhadap total ekspor perikanan Indonesia), tuna-cakalang USD 1,03 miliar (17,4%), cumi-sotong-gurita USD 874,12 juta (14,7%), rajungan-kepiting USD 513,35 juta (8,6%), rumput laut USD 342,16 juta (5,7%), layur-gulama USD 100,96 juta (1,7%), tilapia USD 93,51 juta (1,6%), lobster USD 91,79 juta (1,5%), dan mutiara USD 91,35 juta (1,5%).

Beberapa komoditas utama yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya antara lain: tuna-cakalang (11,6%), cumi-sotong-gurita (14,6%), rajungan-kepiting (14,7%), layur dan gulama (91,1%), tilapia (14,4%), dan lobster (283,6%). Ekspor lobster meningkat secara signifikan ke Tiongkok (266,7%) dan Vietnam (8.395,4%). Peningkatan ekspor tersebut juga didukung oleh kegiatan ekspor benih bening lobster (BBL) selama periode Mei-Desember 2024 dengan nilai USD 15,80 juta (sumber: Badan Karantina Indonesia 2025).

4. Peningkatan Konsumsi Ikan Indonesia



Gambar 1.6. Target dan capaian konsumsi ikan Indonesia

Angka konsumsi ikan menggambarkan tingkat permintaan ikan per kapita secara nasional dalam satu tahun, mencakup ikan segar maupun olahan. Data dihitung berdasarkan survei BPS di seluruh provinsi. Sepanjang periode 2020–2024, konsumsi ikan menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 54,56 kg/kapita pada tahun 2020 menjadi 58,76 kg/kapita pada tahun 2024 atau naik sebesar 7,71% dengan pertumbuhan rata-rata tahunan 1,88%. Peningkatan ini tidak lepas dari keberhasilan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) secara kolaboratif antara pusat, daerah, mitra strategis dan masyarakat. Ditjen PDSPKP selaku unit kerja yang bertanggung jawab terhadap peningkatan konsumsi ikan telah melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan konsumsi ikan antara lain:

- a) Gemarikan;
- b) pembinaan dan pengelolaan pasar ikan;
- c) fasilitasi prasarana dan sarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran; dan
- d) pemetaan preferensi konsumen dan penghitungan serapan ikan di setiap wilayah kabupaten / kota / provinsi / nasional.

Berbagai strategi tersebut saling mendukung untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Indonesia, memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat, dan mendukung perkembangan sektor perikanan nasional. Pada periode 2020-2024, metode perhitungan angka konsumsi ikan merupakan penjumlahan angka konsumsi ikan di 34 provinsi dibagi dengan jumlah provinsi, terdiri atas konsumsi ikan di dalam rumah tangga, konsumsi ikan di luar rumah tangga, dan konsumsi ikan tidak tercatat. Sebagai data dasar perhitungan angka konsumsi ikan adalah bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh BPS dan diolah Ditjen PDSPKP dengan menyetarakan menjadi utuh segar.

Pada tahun 2020, capaian konsumsi ikan nasional sebesar 54,56 kg/kapita/tahun atau 96,75% dari target 56,39 kg/kapita/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal periode, capaian belum optimal dalam memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, capaian konsumsi ikan nasional sebesar 55,16 kg/kapita/tahun atau 94,98% dari target 58,08 kg/kapita/tahun. Capaian konsumsi ikan pada periode tahun 2020-2021 mengalami peningkatan namun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan tantangan yang lebih besar dalam mengoptimalkan tingkat konsumsi ikan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, keterbatasan distribusi, dan daya beli masyarakat.

Tahun 2022, capaian konsumsi ikan mencapai 57,27 kg/kapita/tahun atau 96,21% dari target 59,53 kg/kapita/tahun. Hal ini

menunjukkan adanya perbaikan dari sisi pasokan ikan, infrastruktur penyimpanan dan distribusi, serta efektivitas program promosi konsumsi ikan.

Pada tahun 2023, target konsumsi ikan ditetapkan sebesar 57,61 kg/kapita/tahun, dan tercapai sebesar 57,91 kg/kapita/tahun atau 100,52% dari target. Hal ini menggambarkan perbaikan signifikan pada tata kelola program peningkatan konsumsi ikan.

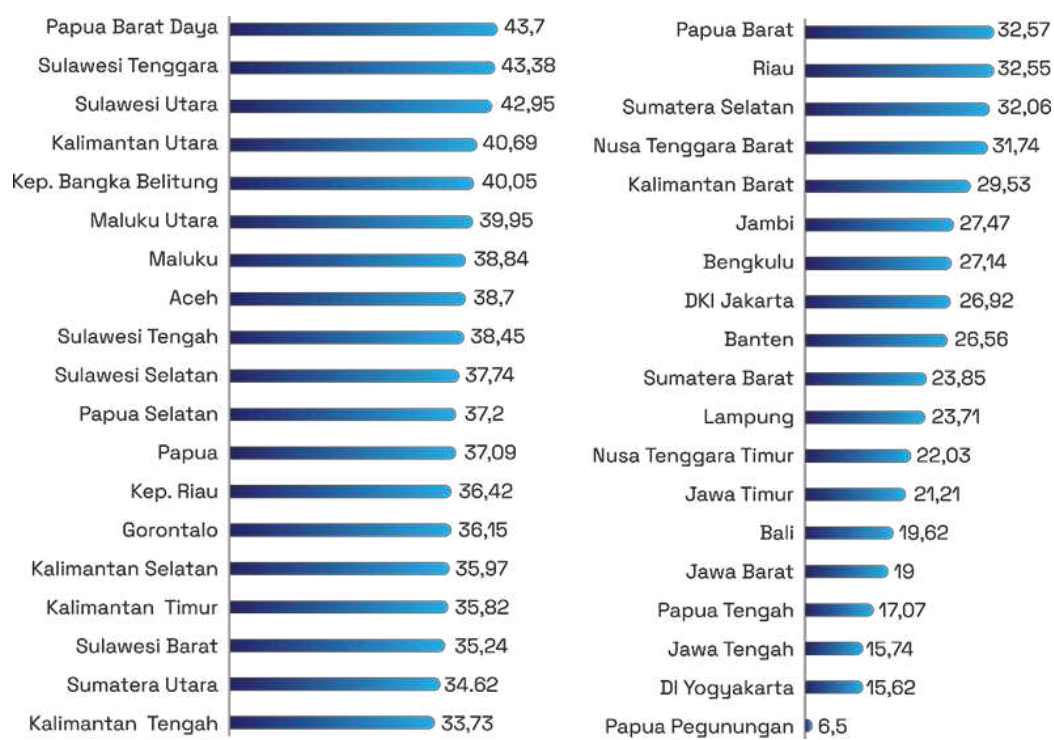
Di tahun 2024, target ditetapkan sebesar 59,00 kg/kapita/tahun, dengan capaian sebesar 58,76 kg/kapita/tahun atau 99,60% dari target. Meskipun tidak mencapai target, capaian konsumsi ikan terus mengalami peningkatan dan berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan peningkatan konsumsi ikan masyarakat. Selama periode 2020–2024, capaian konsumsi ikan nasional menunjukkan tren pertumbuhan positif dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan atau *Average Annual Growth Rate* (AAGR) 1,88% per tahun. Peningkatan capaian konsumsi ikan pada periode 2020-2024, menandakan keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan.

Pada tahun 2025 terdapat reformulasi metodologi perhitungan konsumsi ikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, indikator Angka Konsumsi Ikan (AKI) diubah menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) dan telah ditetapkan besaran target pada tahun 2025–2029 sebesar 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 dan ditargetkan mencapai 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029. Perolehan angka tersebut dihitung berdasarkan KIM dalam rumah tangga secara tertimbang setara utuh segar. Sebagai *baseline data*, dilakukan penghitungan capaian KIM tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 1.1. Perbandingan Capaian AKI dengan KIM Tahun 2020-2024

Tahun	AKI (Kg/Kapita/Tahun)	KIM (Kg/Kapita/Tahun)
2020	54,56	24,48
2021	55,16	25,33
2022	57,27	25,88
2023	57,91	25,07
2024	58,76	25,31

Preferensi konsumsi masyarakat juga memperlihatkan variasi jenis ikan yang dominan. Pada tahun 2024, tilapia tercatat sebagai komoditas dengan tingkat serapan tertinggi mencapai 721,35 ribu ton, disusul tongkol (619,22 ribu ton), kembung (598,58 ribu ton), lele (559,37 ribu ton), dan bandeng (421,13 ribu ton). Sementara itu, ikan seperti gabus dan bawal memiliki tingkat serapan yang relatif rendah, masing-masing sekitar 116,13 ribu ton dan 84,56 ribu ton. Data ini menunjukkan pola konsumsi masyarakat cenderung terfokus pada jenis-jenis ikan yang lebih mudah diakses dan selalu tersedia di pasar.



Gambar 1.7. Konsumsi Ikan Masyarakat Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2024

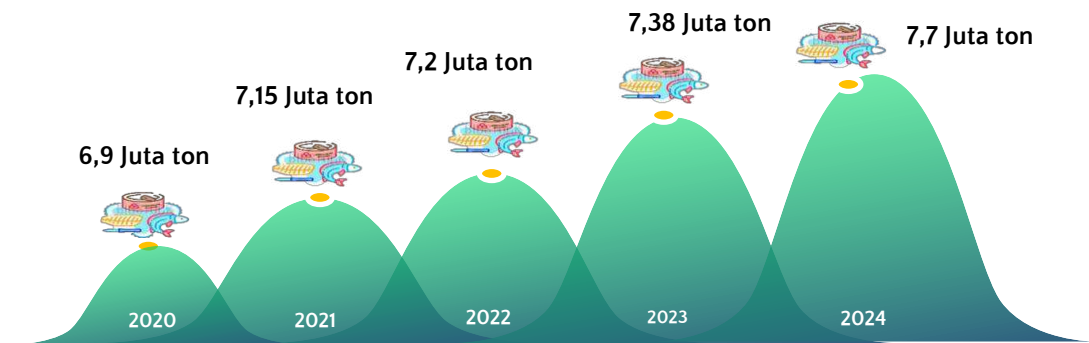
Sumber: Susenas BPS diolah Ditjen PDSPKP, 2024

Berdasarkan capaian KIM per provinsi tahun 2024, terlihat bahwa adanya disparitas yang signifikan antar provinsi di Indonesia sebagaimana Gambar 1.8. Provinsi di bagian timur Indonesia, seperti Papua Barat Daya (43,70 kg/kapita) dan Sulawesi Tenggara (43,38 kg/kapita), memimpin dengan capaian konsumsi tertinggi berkat kekayaan sumber daya laut dan kesukaan masyarakat setempat yang menjadikan menu ikan sebagai menu utama untuk pemenuhan protein. Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah Jawa dan sebagian Sumatera, seperti DI. Yogyakarta (15,62 kg/kapita), Jawa Tengah (15,74 kg/kapita), Lampung (23,71 kg/kapita), dan Sumatera Barat 23,85 kg/kapita. Sementara itu, provinsi terendah yaitu Papua Pegunungan memiliki tantangan letak geografis yang berada di daerah pegunungan sehingga menyulitkan akses distribusi ikan. Perbedaan mencolok ini

menyoroti bahwa pola konsumsi ikan belum merata di seluruh wilayah, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, budaya, aksesibilitas, dan ketersediaan ikan di pasar lokal.

5. Peningkatan Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (VPO)

Volume produk olahan hasil perikanan (VPO) yang setara bahan baku menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, VPO tercatat sebesar 6,9 juta ton, meningkat sebesar 0,7% dibandingkan capaian tahun 2019 yang mencapai 6,85 juta ton. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2023, dimana VPO mengalami peningkatan sebesar 2,5% dibandingkan tahun sebelumnya, atau setara dengan tambahan produksi sebesar 0,18 juta ton.



Gambar 1.8. Capaian volume produk olahan hasil perikanan

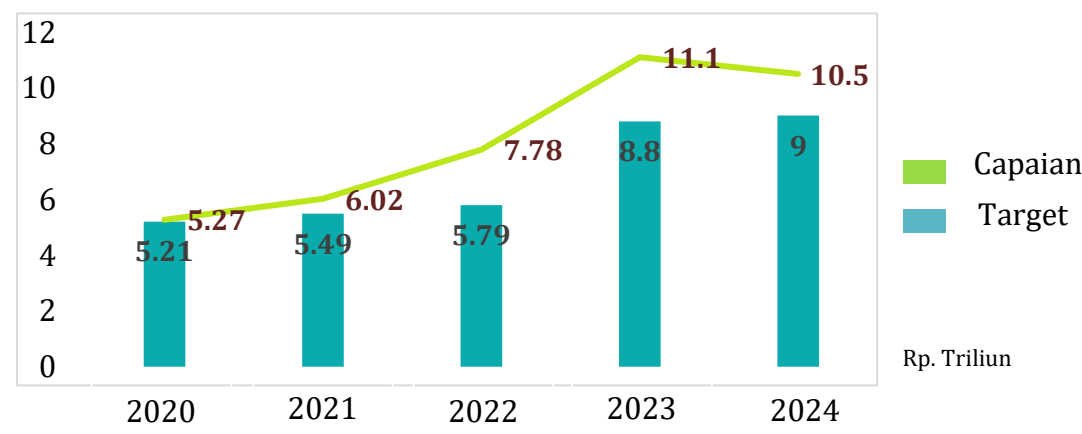
Memasuki tahun 2024, capaian VPO mencapai 7,7 juta ton, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi seluruh pelaku industri pengolahan ikan, baik skala mikro, kecil, menengah, maupun besar, yang secara bersama-sama meningkatkan produksi produk olahan hasil perikanan.

Peningkatan VPO ini menjadi salah satu indikator penting dalam memperkuat daya saing produk perikanan nasional, khususnya melalui penyediaan produk olahan yang lebih bernilai tambah dan beragam. Dengan meningkatnya volume produk olahan, ketersediaan produk perikanan yang dapat diakses pasar domestik maupun ekspor menjadi lebih stabil, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pengolahan terhadap perekonomian nasional.

6. Peningkatan Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan

Investasi sektor kelautan dan perikanan berasal Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan kredit investasi yang terdiri dari usaha bidang budi daya, penangkapan, jasa perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

nilai investasi di sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2023 mencapai Rp11,1 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 26,85% dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun 2022 yang mencapai Rp7,78 triliun. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan dalam menarik minat investasi di sektor yang vital bagi perekonomian maritim Indonesia.



Gambar 1.9. Target dan capaian nilai investasi kelautan dan perikanan

Selama periode 2020 hingga 2023, sektor kelautan dan perikanan mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,83%. Peningkatan ini mencerminkan keberlanjutan dan stabilitas sektor ini, meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi global. Investasi di sektor pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan berasal dari berbagai sumber, di antaranya: PMA, PMDN, dan kredit investasi.

Target nilai investasi kelautan dan perikanan pada tahun 2024 sebesar Rp9,00 triliun. Adapun angka perkiraan realisasi nilai investasi kelautan dan perikanan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp10,50 triliun yang terdiri dari PMA senilai Rp3,69 triliun, PMDN senilai Rp4,22 triliun dan kredit investasi senilai Rp2,58 triliun. Capaian setara 116,63% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 maupun target RPJMN yaitu sebesar Rp9 triliun. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 34,56% dari triwulan sebelumnya pada tahun berjalan dan penurunan sebesar 13,41% dari capaian tahun 2023.

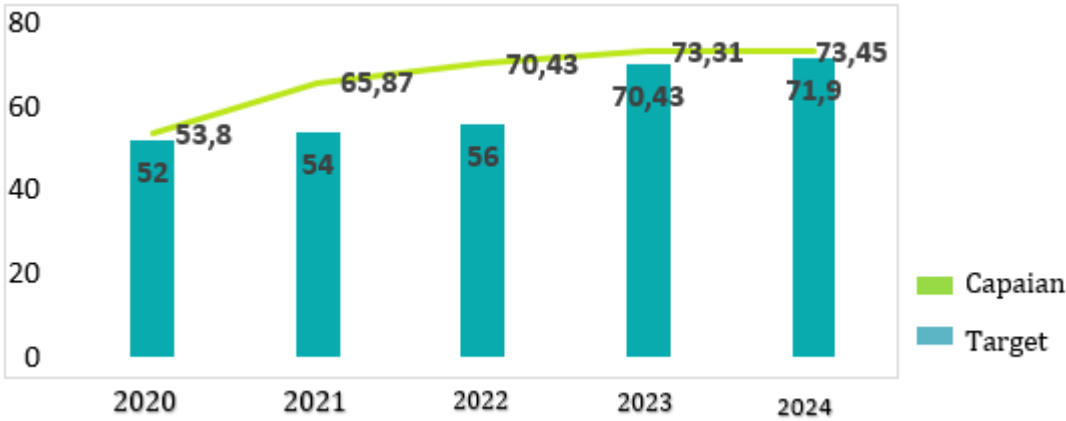
Secara keseluruhan, peningkatan investasi di sektor kelautan dan perikanan menunjukkan perkembangan positif yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi yang meningkat tersebut juga menunjukkan tumbuhnya kepercayaan investor terhadap jaminan kepastian investasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

7. Peningkatan Kinerja Logistik Hasil Perikanan

Pada tahun 2024, Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) diukur untuk moda transportasi laut pada 7 koridor yaitu:

- a) Bitung-Surabaya/Jakarta;
- b) Makassar-Surabaya/Jakarta;
- c) Kendari-Surabaya/Jakarta;
- d) Ambon-Surabaya/Jakarta;
- e) Kupang-Surabaya/Jakarta;
- f) Mimika-Surabaya/Jakarta;
- g) Biak-Surabaya/Jakarta

Realisasi capaian IKLI tahun 2024 sebesar 73,45 (Baik) atau sebesar 102% dari target. Kinerja terendah disumbangkan oleh dimensi pengelolaan pengadaan hasil perikanan, sedangkan kinerja tertinggi disumbangkan oleh dimensi konektivitas dan disusul oleh dimensi efisiensi. Dimensi pengelolaan pengadaan hasil perikanan bertujuan memberikan gambaran tentang perencanaan produksi dan pengadaan barang logistik sebagai panduan untuk proses distribusi, namun dari data diperoleh rendahnya dimensi ini diakibatkan oleh data-data dukung terkait pengelolaan pengadaan hasil perikanan tidak sepenuhnya diakses atau dimanfaatkan sebagai panduan perencanaan distribusi hasil perikanan. Pada tahun 2020, capaian IKLI berada pada angka 53,8. Dalam kategori nilai IKLI, angka tersebut masuk dalam kategori cukup. Pada tahun 2021-2024, nilai indeks kinerja logistik berkisar antara 65,87 - 73,45 atau termasuk dalam kategori nilai baik. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain koordinasi antar instansi dan penguatan sistem informasi dalam upaya penyiapan ekosistem logistik yang baik dan efisien.



Gambar 1.10. Target dan capaian kinerja logistik hasil perikanan

8. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Kredit Program

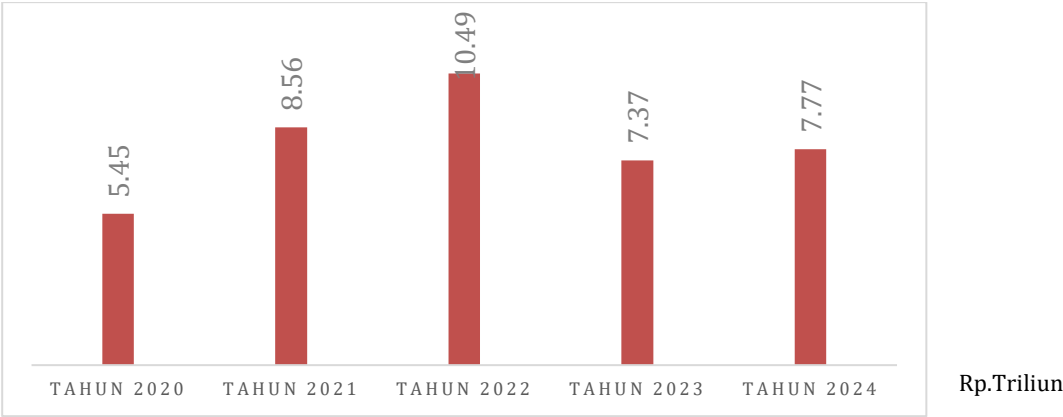
Pembiayaan usaha di sektor kelautan dan perikanan melalui kredit program pada tahun 2024 mencapai Rp7,77 triliun atau naik 5,43% dibanding tahun 2023. Kredit program tersebut terdiri dari:

- a) Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp6,94 triliun, disalurkan kepada 134.213 debitur; dan
- b) Kredit Ultra Mikro (UMi) yang bersumber dari lembaga Non Bank sebesar Rp836 miliar, disalurkan kepada 162.360 debitur.

Jumlah debitur yang mendapatkan pembiayaan Kredit Program sektor kelautan dan perikanan meningkat sebesar 20,49% dibandingkan tahun 2023, yaitu dari 246.143 debitur menjadi 296.573 debitur.

Adapun rincian bidang usaha kelautan dan perikanan yang menerima penyaluran Kredit Program terdiri dari:

- a) budi daya ikan sebesar Rp2,58 triliun;
- b) perdagangan hasil perikanan Rp 2,32 triliun;
- c) penangkapan ikan Rp 2,17 triliun;
- d) jasa perikanan Rp493,46 miliar;
- e) pengolahan hasil perikanan Rp186,94 miliar; dan
- f) pergaraman Rp12,78 miliar.



Gambar 1.11. Capaian pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program

9. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) merupakan ukuran perkembangan implementasi RB di KKP. Selama periode 2020–2024, realisasi nilai kinerja Reformasi Birokrasi menunjukkan tren fluktuatif namun secara konsisten berada di atas target yang ditetapkan dalam Renstra KKP 2020–2024. Rata-rata pertumbuhan capaian nilai Reformasi Birokrasi selama periode tersebut mencapai 3,20% per tahun, tetap positif dan melampaui target. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024, dengan nilai sebesar 91,70, atau setara dengan 114,63% dari target tahun 2024 yang sebesar 80,0.

10. Penghargaan yang telah diraih 2020-2024

Penghargaan yang diterima oleh Ditjen PDSPKP merupakan sebuah capaian positif atas kinerja Ditjen PDSPKP. Selama periode tahun 2020-2024 menerima berbagai macam antara lain yaitu :

- a) *Herudi Technical Committee Award (HTCA) Tahun 2020*
Penyerahan plakat penghargaan HTCA dilakukan langsung oleh Kepala BSN kepada Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan Nonpangan dilaksanakan tanggal 6 November 2020.
- b) *Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021*
Ombudsman Republik Indonesia telah memberikan penghargaan kepada Ditjen PDSPKP melalui surat Nomor B/2020/PC.02/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 terhadap pelayanan publik yaitu Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan (RPHP), dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengolahan Ikan.
- c) *Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) 2023*
Program optimalisasi distribusi hasil kelautan dan perikanan tujuan domestik dan ekspor yang dijalankan oleh Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP tersebut meraih penghargaan "*Government of the Year*" pada ajang *Indonesia Logistics Awards (ILA) 2023. Supply Chain Indonesia (SCI)*, lembaga independen bidang logistik dan *supply chain* di Indonesia, mengapresiasi keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengimplementasikan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).
- d) *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2023 pada Forum Hukum 2024 lingkup KKP.*
Ditjen PDSPKP mendapat Penghargaan Terbaik 1 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2023 pada Forum Hukum 2024 lingkup KKP. Adapun tema forum "Dukungan Hukum dalam Mewujudkan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 2045".
- e) *Forum Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024*
Sekretariat Ditjen PDSPKP dan Badan Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) memperoleh penghargaan dengan sebagai unit kerja berpredikat "INFORMATIF" dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan KKP Tahun 2023.
- f) *Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023*
Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP memperoleh penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Ombudsman RI di lingkungan KKP dengan kategori "Kualitas Tertinggi".
Dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, Ditjen PDSPKP senantiasa bersinergi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang pengolahan dan pemasaran kelautan dan perikanan, logistik hasil kelautan dan perikanan yang terdiri dari Instansi

pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan asosiasi usaha yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan.

B. Potensi dan Permasalahan

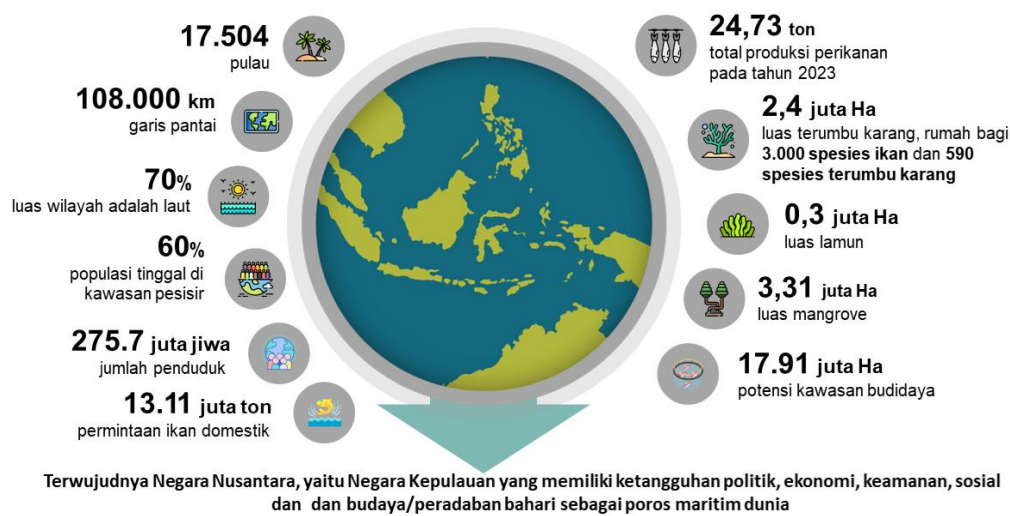
1. Potensi

Indonesia memiliki modal dasar untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dunia, dengan jumlah pulau mencapai 17.504 pulau, dimana yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebanyak 16.056 pulau. Panjang garis pantai Indonesia merupakan yang terpanjang kedua di dunia mencapai 108.000 km. Sekitar 70% wilayah Indonesia adalah perairan laut, yang terbagi atas perairan laut kepulauan Indonesia dan perairan laut pedalaman sekitar 3.110.000 km², perairan teritorial Indonesia sekitar 290.000 km², perairan zona tambahan Indonesia sekitar 270.000 km², perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia sekitar 3.000.000 km², dan perairan landas kontinen Indonesia 2.800.000 km².

Perairan laut Indonesia menjadi habitat 8.500 spesies ikan, yang mencakup 37% dari total spesies ikan dunia. Dari spesies ikan tersebut, beberapa jenis diantaranya merupakan ikan laut yang bernilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, cumi, kepiting, ikan karang, dan rumput laut. Perairan air tawar Indonesia memiliki sekitar 1.300 spesies ikan, menempatkan Indonesia pada peringkat pertama dengan jumlah spesies ikan air tawar terbanyak di Asia dan peringkat kedua di dunia setelah Brazil. Potensi sumber daya perikanan tersebut berkontribusi signifikan terhadap produksi perikanan tangkap sebesar 7,77 juta ton dari total produksi perikanan nasional yang mencapai 24,73 juta ton pada tahun 2023. Selain itu, Indonesia memiliki potensi kawasan budi daya yang sangat luas, yaitu 17,91 Juta Ha. Potensi kawasan budi daya tersebut terbagi atas lahan budi daya air tawar seluas 2.830.540 ha (15,8%), budi daya air payau seluas 2.964.331 ha (16,5%) dan budi daya laut seluas 12.123.383 ha (67,6%). Potensi lahan budi daya perikanan dapat dikembangkan hingga 17,9 Juta Ha dimana tingkat pemanfaatan saat ini masih di angka 6%. Hal ini memberi peluang bagi pengembangan usaha kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan menyejahterakan nelayan, pembudi daya, pengolah, pemasar, investor perikanan, dan masyarakat.

Indonesia juga mempunyai ekosistem terumbu karang dan padang lamun yang luas untuk mendukung perkembangan spesies ikan, tumbuhan air, dan biota lainnya yang potensial. Saat ini, luas ekosistem terumbu karang tersebut mencapai 2,4 Juta Ha atau sekitar 18% dari total terumbu karang dunia. Sebaran terumbu karang Indonesia ditemukan mulai dari perairan Sabang sampai Merauke dengan

konsentrasi sebaran tertinggi berada di bagian tengah dan timur perairan Indonesia, yaitu di perairan Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku, yang sekaligus menjadi pusat segitiga keanekaragaman karang dunia (*coral triangle*). Ekosistem terumbu karang tersebut telah menjadi rumah bagi 3.000 spesies ikan dan 590 spesies terumbu karang. Padang lamun juga tersebar di berbagai wilayah perairan laut Indonesia dengan luas mencapai sekitar 0,3 Juta Ha (LIPI, 2018). Keberadaan padang lamun menciptakan ruang bagi banyak ikan dan organisme laut untuk berkembang dan berinteraksi, membentuk satu kesatuan ekosistem di bawah laut.



Gambar 1.12. Modal dasar peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan

Pada wilayah pesisir, Indonesia mempunyai ekosistem mangrove yang luas, yaitu sekitar 3,31 Juta Ha atau sekitar 20-25% dari total ekosistem mangrove dunia. Ekosistem mangrove tersebut tersebar di wilayah kepulauan Indonesia, yaitu Papua sekitar 1,56 Juta Ha, Sumatera sekitar 0,66 Juta Ha, Kalimantan sekitar 0,68 Juta Ha, Maluku sekitar 0,22 Juta Ha, Jawa 0,06 Juta Ha, dan Bali-Nusa Tenggara sekitar 0,40 Juta Ha. Ekosistem mangrove tersebut memberi kontribusi besar dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hasil penelitian menunjukkan hutan mangrove mempunyai kapasitas penyerapan karbon 3-5 kali lebih baik dibandingkan hutan tropis. Ekosistem mangrove juga menjadi tempat pemijahan, pembesaran, mencari makan berbagai jenis ikan, tempat hidup banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk obat dan farmasi, serta zona pengembangan ekonomi kreatif.

Potensi perikanan tangkap, perikanan budi daya, terumbu karang, lamun, dan mangrove dapat dioptimalkan pengelolaannya dengan menggerakkan usaha dan investasi kelautan dan perikanan yang dapat meningkatkan nilai tambah. Untuk mendukung pengelolaan di sektor hilir, usaha pengolahan ikan (UPI) tumbuh pesat di wilayah Indonesia.

Untuk UPI skala menengah dan besar, saat ini jumlahnya mencapai 1.475 unit atau tumbuh sekitar 51,28% dari tahun 2019 yang jumlahnya 975 unit. Untuk UPI skala mikro kecil, jumlahnya saat ini mencapai 81.530 unit, atau tumbuh sekitar 30,68% dari tahun 2019 (61.389 unit). Untuk investasi, peluangnya sangat terbuka baik untuk investasi yang berasal dari PMDN maupun PMA. Investasi tersebut sangat diperlukan untuk mendukung optimalisasi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan. Pengembangan produk olahan yang bernilai tambah, memberi prospek penting bagi investasi karena inovasi produk terus meningkat dan UPI baru akan banyak dibangun.

Selain itu, peningkatan daya saing sektor kelautan dan perikanan perlu didukung oleh penguatan literasi keuangan bagi pelaku usaha, terutama nelayan, pembudi daya, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pengolahan hasil perikanan. Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan usaha, pencatatan transaksi, perencanaan modal, dan pemahaman risiko usaha menjadi faktor penting agar pelaku usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Literasi keuangan yang baik juga membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha untuk mengakses fasilitas keuangan formal, termasuk pembiayaan usaha melalui program KUR dan pembiayaan Ultra Mikro (Umi) sebagai dukungan permodalan untuk pengembangan usaha. Namun pemanfaatannya belum maksimal akibat keterbatasan pengetahuan administrasi usaha, persyaratan bank, dan minimnya pendampingan teknis di lapangan. Oleh karena itu, penguatan edukasi keuangan dan pendampingan pembiayaan usaha menjadi kunci agar masyarakat pesisir dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan secara optimal, meningkatkan skala usaha, serta memperkuat kemandirian ekonomi maritim nasional.

Untuk pemasaran produk kelautan dan perikanan, jumlah penduduk Indonesia dan peluang ekspor yang terus meningkat menjadi andalan utama. Menurut BPS (2024), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 sekitar 258 Juta Jiwa, dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 275,7 Juta Jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 165,42 Juta Jiwa atau 60% bermukim di kawasan pesisir pulau-pulau Indonesia. Jumlah dan pola penyebaran penduduk tersebut merupakan bonus demografi yang potensial bagi pengembangan produk kelautan dan perikanan, karena dapat menciptakan permintaan ikan domestik sekitar 13,11 Juta Ton. Permintaan tersebut diyakini terus meningkat setiap tahunnya, terutama untuk produk ikan siap saji yang bernilai tinggi, seperti sashimi, sushi tuna, dan aneka olahan lobster. Hal ini tidak lepas dari proporsi usia ekonomi aktif yang dominan pada penduduk tersebut, dimana mereka mempunyai *disposable income* yang tinggi. Nilai pasar ekspor hasil perikanan terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, dari US\$4,94 miliar tahun 2019 menjadi US\$5,63 miliar tahun 2019.

Sedangkan komoditas utama yang diminati pasar ekspor adalah udang, tuna-cakalang-tongkol, cumi-sotong-gurita, rajungan-kepiting, dan rumput laut. Tujuan utama ekspor adalah Amerika Serikat, Tiongkok, ASEAN, Jepang, dan Uni Eropa.

Melihat potensi yang besar tersebut, Ditjen PDSPKP akan terus melakukan berbagai upaya yang mendukung pembangunan nasional di sektor kelautan dan perikanan, khususnya bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Hal ini dilakukan melalui pengembangan produk perikanan bernilai tambah yang bermutu dan aman, pengembangan sistem logistik ikan yang efisien dan menguatkan jaringan kepulauan Indonesia, penguatan ketertelusuran, peningkatan akses pasar dalam negeri dan ekspor perikanan, serta pengembangan usaha dan investasi yang menguatkan struktur ekonomi maritim Indonesia.

2. Permasalahan

Dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat berbagai tantangan kompleks yang saling berkaitan dan memerlukan penanganan secara menyeluruh. Salah satu isu utama adalah produk perikanan yang mudah rusak sehingga membutuhkan penanganan ekstra untuk mempertahankan nilai dan mutunya. Penyediaan bahan baku yang memenuhi persyaratan ekspor menjadi keharusan dalam peningkatan kinerja ekspor perikanan. Pembinaan terhadap UPI perlu diperkuat, terutama dalam penyediaan produk yang berkualitas, diversifikasi bentuk penyajian produk, pelaksanaan pengujian mutu secara bertingkat, serta optimalisasi penerapan sistem ketertelusuran produk perikanan. Selain itu, untuk menjamin keamanan produk perikanan yang diperdagangkan, penilaian dan sertifikasi mutu perlu ditingkatkan, khususnya untuk UPI, pelaku pasar, dan pelaku logistik. Penguatan aspek kelembagaan dan peningkatan investasi pada sektor pengolahan dan pemasaran juga menjadi bagian penting yang harus dikembangkan untuk mendukung ekosistem bisnis kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Di samping tantangan teknis tersebut, rendahnya literasi keuangan pelaku usaha perikanan, khususnya UPI skala mikro dan kecil, menjadi hambatan signifikan dalam pengelolaan usaha secara berkelanjutan. Banyak pelaku usaha belum mampu melakukan pencatatan keuangan yang baik, mengelola arus kas, dan memahami risiko usaha, sehingga berdampak pada kemampuan mereka dalam mengakses pembiayaan formal.

Terkait produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), perlu dilakukan penanganan ekstra untuk mempertahankan nilainya. Penyediaan bahan baku yang memenuhi persyaratan ekspor menjadi kewajiban dalam peningkatan ekspor perikanan. Ke depan, pembinaan terhadap UPI dalam penyediaan produk perikanan yang berkualitas perlu diperkuat, begitu juga diversifikasi produk pengujian mutu perlu

dilakukan bertingkat, serta implementasi sistem ketertelusuran untuk menjamin kepercayaan dan transparansi rantai pasoknya. Di samping itu, sebagai upaya untuk memastikan keamanan produk perikanan yang diperdagangkan, penilaian dan sertifikasi perlu terus ditingkatkan, terutama untuk UPI, pelaku pasar dan logistik perikanan sehingga mempunyai jangkauan pasar yang luas. Rendahnya pemahaman mengenai akses pembiayaan usaha melalui skema kredit program pemerintah, seperti KUR dan UMi, menyebabkan banyak UPI kesulitan memperoleh tambahan modal untuk investasi peralatan, peningkatan mutu, dan ekspansi usaha. Di banyak wilayah pesisir, pelaku usaha masih bergantung pada pembiayaan informal yang berbiaya tinggi. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan, pelatihan manajemen keuangan, dan pendampingan akses pembiayaan usaha menjadi sangat penting untuk mendorong pelaku UPI naik kelas dan memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan.

Indonesia merupakan salah satu negara eksportir utama produk perikanan di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2024), volume ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2024 mencapai 1,19 juta ton dengan nilai sebesar 5,95 miliar USD. Meski demikian, sebagian besar ekspor tersebut masih didominasi oleh produk dalam bentuk mentah atau minim pengolahan, sementara tren global menunjukkan peningkatan permintaan terhadap produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, ekspor udang Indonesia tahun 2024 tercatat sebanyak 226.000 ton, namun sekitar 60% di antaranya masih dalam bentuk udang mentah beku. Sayangnya, potensi peningkatan nilai tambah ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, terutama karena terbatasnya kapasitas dan kemampuan industri pengolahan perikanan di dalam negeri. Dengan dominasi pelaku usaha berskala UMKM, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan keahlian teknis, serta rendahnya jaminan mutu bahan baku dan produk akhir. Hal ini menjadi salah satu penghambat utama dalam upaya diversifikasi produk ekspor perikanan Indonesia. Selain keterbatasan teknis tersebut, pelaku UPI UMKM juga menghadapi masalah dalam pengelolaan pembiayaan dan perencanaan investasi usaha. Banyak UPI yang belum mampu menyiapkan proposal usaha, laporan keuangan sederhana, maupun dokumen legalitas yang diperlukan untuk mengakses kredit program, sehingga membutuhkan dukungan pendampingan yang lebih kuat dari pemerintah dan lembaga keuangan.

Keterbatasan fasilitas gudang beku masih menjadi hambatan utama dalam sistem logistik perikanan di Indonesia. Berdasarkan data Tahun 2024, kapasitas gudang beku nasional mencapai sekitar 813.966 ton dengan 2.110 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun distribusi yang belum merata, rendahnya tingkat pemanfaatan dan belum

terintegrasi secara optimal dalam rantai pasok mengakibatkan fungsi penyimpanan belum mampu mendukung rantai nilai perikanan secara maksimal. Kondisi wilayah yang mengalami surplus produksi dan mengalami defisit juga memerlukan fasilitas penyimpanan untuk menampung ikan yang dipasok. Oleh karena itu, masih dibutuhkan penambahan fasilitas gudang beku dengan estimasi kebutuhan penambahan sampai tahun 2029 adalah sebesar 251.697 ton.

Ketersediaan es merupakan faktor krusial dalam menjaga mutu hasil perikanan di Indonesia dengan karakteristik negara kepulauan, rantai pasok ikan dari lokasi penangkapan atau budi daya hingga konsumen akhir sangat bergantung pada rantai dingin (*cold chain*) yang efektif. Kebutuhan es tahun 2025 adalah 2.677.700 ton. Saat ini, pemenuhan fasilitas es yang terjangkau dan mudah diakses oleh nelayan, pembudi daya ikan, pendistribusian ikan, UPI, dan pemasar ikan menjadi sangat penting. Untuk itu, kebutuhan es perikanan secara nasional yang perlu dipenuhi sampai tahun 2029 adalah 16.328.136 ton.

Produksi ikan yang bersifat musiman juga menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Data statistik perikanan tangkap menunjukkan produksi ikan laut sangat fluktuatif sepanjang tahun dan mengalami yang namanya musim puncak, musim, sedang, dan musim paceklik penangkapan ikan. Pada musim puncak produksi ikan sangat berlimpah, sementara di musim paceklik hasil tangkapan susah didapat. Pola musim tersebut juga bisa berbeda di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Hal ini kemudian menjadi pemicu terjadinya disparitas produksi ikan yang tinggi antar wilayah kepulauan Indonesia yang didukung dengan keterbatasan ketersediaan prasarana dan sarana sistem rantai dingin dan akses mobilitas transportasi berpendingin.

Disparitas berikutnya yang menonjol dan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional di sektor kelautan dan perikanan adalah disparitas wilayah produksi ikan dan industri pengolahan. Saat ini, sekitar 82% produksi perikanan tangkap berada di luar Pulau Jawa, sedangkan 45% Unit Pengolahan Ikan (UPI) tersebar di Pulau Jawa. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian industri pengolahan ikan masih mengalami kekurangan bahan baku. Oleh karena itu, ke depan diperlukan solusi yang tepat yang tidak merugikan pelaku UPI maupun nelayan serta mendukung keberlanjutan sistem bisnis. UPI banyak dikembangkan di Pulau Jawa terutama dipengaruhi oleh kemudahan logistik dan kedekatan dengan pasar potensial yang sebagian besar berada di wilayah Jawa.

Dari sisi konsumen, citra ikan dan kondisi pasar ikan yang dinilai kurang layak menjadi salah satu hambatan dalam peningkatan konsumsi ikan domestik. Berdasarkan riset Institut Pertanian Bogor (2025) tentang

Preferensi dan Perilaku Konsumen Produk Hasil Perikanan, beberapa faktor seperti bau amis, keberadaan duri atau keterbatasan produk ikan fillet, serta akses terbatas, baik dari segi jarak maupun kondisi sarana dan prasarana yang menyebabkan pasar ikan tradisional semakin kurang diminati oleh konsumen rumah tangga modern. Hasil riset menunjukkan bahwa sekitar 31% responden memilih berbelanja di supermarket dan 23% melalui platform daring, serta sekitar 23% yang masih berbelanja di pasar tradisional. Kondisi ini diperkuat dengan berkembangnya toko dan ritel modern yang menyediakan beragam sumber protein, seperti daging sapi, ikan, dan ayam, dengan kualitas produk yang baik, aman, serta didukung lingkungan belanja yang bersih dan mudah dijangkau.

Hambatan Konsumsi Lainnya

1. Keberadaan Duri	71%	Sangat Tinggi
2. Preferensi Anak Rendah	57%	Tinggi
3. Akses Terbatas	43%	Sedang
4. Bau Amis	29%	Sedang
5. Harga Mahal	29%	Sedang

Gambar 1.13. Hambatan Konsumsi Lainnya

Pada studi yang sama, ditemukan bahwa motivasi utama konsumen membeli ikan adalah pertimbangan kesehatan. Dalam memilih ikan, konsumen umumnya mengandalkan tingkat kesegaran yang dinilai melalui indikator visual dan sensori, seperti kondisi mata dan insang, tekstur daging, bau, warna kulit, dan sisik.

Mata Ikan Jernih, menonjol, tidak keruh <i>Indikator #1 yang paling dipercaya</i>	Insang Merah segar, tidak kusam/coklat <i>Menunjukkan kesegaran optimal</i>	Tekstur Daging Kenyal, elastis saat ditekan <i>Ikan segar kembali ke bentuk semula</i>
Bau Segar laut, tidak amis menyengat <i>Bau amis = tanda tidak segar</i>	Warna Kulit Cerah, mengkilap, tidak kusam <i>Visual appeal penting</i>	Sisik Menempel kuat, tidak mudah lepas <i>Tanda handling yang baik</i>

Faktor lain yang turut menentukan keputusan konsumen adalah faktor kepraktisan, dimana 71% responden merasa ikan utuh cukup merepotkan karena (1) perlu waktu dan tenaga untuk penyiapan, dan (2) resiko duri.

Kepraktisan: Faktor Paling Memengaruhi

3 Aspek Kritis yang Menentukan Keputusan

**Duri (71%)**
Hambatan #1: Keamanan anak, beban persiapan • Solusi: Fillet dori, bandeng presto • E-commerce: Boneless paling dicari

**Keterbatasan Waktu**
Modern retail: Surimi, breaded, RTC dominan • E-commerce: Crispy & seafood instan tertinggi • Pasar tradisional: Ikan utuh perlu waktu olah

Berdasarkan studi yang dilakukan pada tahun 2021 di Pasar Ikan Modern Muara Baru, faktor utama yang memengaruhi pemilihan ikan oleh konsumen meliputi harga yang terjangkau, tingkat kesegaran, tidak berbau, kebersihan, serta tekstur daging yang kenyal. Di sisi lain, kondisi pasar ikan tradisional yang ada saat ini umumnya masih belum memenuhi standar produk, terutama dari aspek kesegaran dan mutu- serta standar layanan yang diharapkan konsumen, seperti variasi produk (*fillet*, olahan, dll), transparansi harga, ketersediaan fasilitas pasar, dan kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan dalam negeri, diperlukan upaya peningkatan kualitas produk dan layanan di pasar ikan tradisional melalui langkah-langkah berikut:

1. Peningkatan standar higienitas pasar
2. Penyediaan fasilitas *cold room* serta sarana dan prasarana pendukung lainnya
3. Penerapan transparansi harga
4. Standarisasi mutu ikan
5. Pemberian jaminan kualitas produk ikan
6. Pengembangan dukungan layanan belanja daring

**Perishable Product**
Ikan sebagai komoditas ekonomi sekaligus bahan pangan, kaya kandungan gizi namun mudah rusak. Diperlukan penanganan ekstra dan sertifikasi produk

**Ikan Bersifat Musiman**
Umumnya terjadi pada komoditas perikanan tangkap. Ikan tidak dapat ditangkap sepanjang waktu dan pola musimnya berbeda antar wilayah

**Disparitas Wilayah Produksi dan Industri**
82% produksi perikanan tangkap berada di luar Jawa, sedangkan 45% UPI tersebar di Pulau Jawa. Dampak UPI kekurangan bahan baku dan penghentian operasi

**Logistik dan Konektivitas antar Wilayah**
Konektivitas antara wilayah produksi, pengumpulan dan pasar perlu ditingkatkan, antara lain melalui penyediaan ekosistem logistik yang baik dan efisien

**Industri Pengolahan Didominasi Skala Mikro Kecil**
Jumlah industri pengolahan ikan didominasi skala mikro dan kecil sebanyak 81.350 unit. Diperlukan peningkatan kelas usaha kelautan dan perikanan

**Ketersediaan dan Keterhubungan Informasi Produksi dan Pasar**
Ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi seperti musim ikan, jadwal tebar, dan panen dengan kebutuhan pasar perlu ditingkatkan

**Persyaratan, Hambatan, dan Diplomasi Perdagangan**
Persyaratan pasar, hambatan pasar di negara importir bergerak dinamis, diperlukan pemenuhan persyaratan pasar dan diplomasi perdagangan yang handal

**SDM Bidang Pengolahan, Mutu, dan Pemasaran Ikan Perlu Ditingkatkan**
Saat ini baru tersedia 190 Pembina Mutu dan 264 Analis Pasar Hasil Perikanan di seluruh Indonesia. Padahal posisinya sangat vital dalam transfer knowledge standar mutu dan informasi pasar

Gambar 1.14. Permasalahan dan tantangan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi disparitas wilayah produksi ikan dan industri pengolahan adalah dengan penguatan sistem logistik ikan. Sistem logistik ikan membantu UPI mendapatkan bahan baku ikan secara kontinu, sekaligus mendukung distribusi dan pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan yang banyak tersebar di Kawasan Indonesia Timur. Pada aspek yang lain sistem logistik ini juga masih menemui banyak kendala terutama terkait efisiensi, ketersediaan infrastruktur, ketertelusuran, dan konektivitas antar wilayah.

Dalam 5 tahun terakhir, kinerja logistik ikan nasional berada di angka antara 65,87–73,45 atau masuk dalam kategori nilai baik. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan, antara lain koordinasi antar instansi serta penguatan sistem informasi dalam upaya penyiapan ekosistem logistik yang baik dan efisien. Koordinasi, kerja sama, dan simbiositas aktivitas diantara pelaku logistik perlu ditingkatkan. Begitu juga dukungan pemerintah yang diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan taktis yang memicu berkembangnya aktivitas logistik ikan. Hal ini akan mendorong tumbuhnya aktivitas logistik ikan di wilayah produksi, pengumpulan, dan pasar, sekaligus memperkuat konektivitas wilayah tersebut.

Tantangan berikutnya terjadi pada industri pengolahan ikan, dimana saat ini masih didominasi UPI berskala mikro kecil. Berdasarkan data dari pelaku pengolahan ikan yang terdaftar dalam sistem KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan), tercatat sebanyak 77.798 UPI, yang didominasi oleh UPI skala Mikro dan Kecil sebanyak 76.318 unit atau 98,10%, sementara UPI skala Menengah dan Besar hanya berjumlah 1.480 unit atau 1,90%. Dominasi pelaku usaha kecil ini mencerminkan struktur industri pengolahan perikanan nasional yang masih bertumpu pada usaha rakyat dengan keterbatasan sarana penanganan dan pengolahan, teknologi, kapasitas, dan akses pasar, serta menegaskan perlunya kebijakan afirmatif untuk memperkuat daya saing dan integrasi UPI kecil ke dalam rantai pasok yang lebih besar dan terorganisasi. Ke depan, UPI skala mikro kecil tersebut perlu dibina dan difasilitasi sehingga lebih berkembang dan meningkat kelasnya. Hal ini perlu dilakukan antara lain dengan memfasilitasi sarana penanganan dan pengolahan serta memperbanyak inkubator bisnis produk kelautan dan perikanan yang nantinya bisa melatih UPI dalam pengembangan produk dan memfasilitasi UPI untuk naik kelas. Upaya berikut perlu dilakukan adalah fasilitasi akses pembiayaan usaha dan fasilitasi kemitraan usaha, sehingga membantu perluasan usaha dan jaringan kerja sama UPI. Fasilitasi akses pembiayaan melalui kredit program dan penguatan pendampingan usaha diperlukan untuk meningkatkan skala usaha, modernisasi peralatan, dan mendukung integrasi UPI kecil dalam rantai pasok industri perikanan nasional.

Untuk mendukung ekspansi bisnis dan pasar produk kelautan dan perikanan, terutama dalam memperluas jaringan ke pasar ekspor, maka ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi dan pasar perlu ditingkatkan, serta persyaratan, penyelesaian hambatan dan diplomasi perdagangan perlu diperkuat. Saat ini, informasi produksi seperti musim ikan, jadwal tebar, dan panen hanya terjalin antar nelayan, pemilik kapal, pembudi daya, penyedia pakan, dan penyedia perbekalan, sementara informasi pasar hanya terjadi diantara pedagang, pengumpul, dan pelaku ekspor. Ke depan jalur informasi tersebut perlu diperluas dan dikembangkan dari hulu ke hilir, sehingga semua pelaku usaha/bisnis perikanan dapat saling mendukung dan mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama.

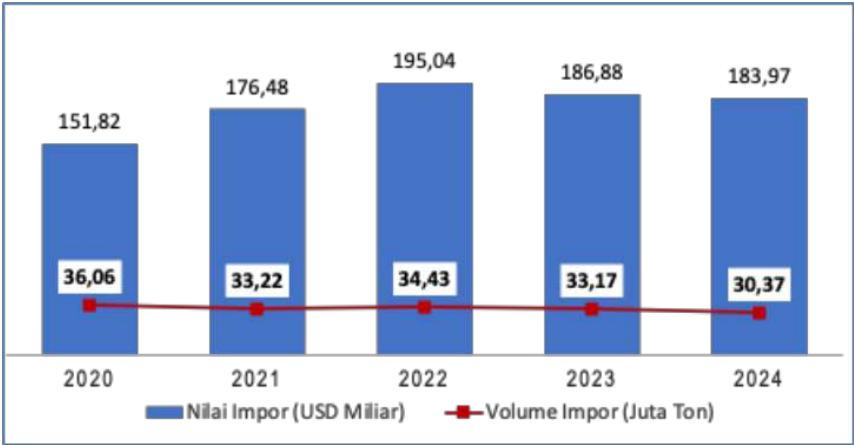
Hal ini penting untuk peningkatan efisien dan pemanfaatan maksimal peluang pasar yang ada. Terkait persyaratan pasar dan hambatan pasar, akan selalu terjadi karena negara importir memiliki regulasi tersendiri atas produk impor dan berupaya melindungi pasar domestik produk. Saat ini ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia masih bertumpu pada pasar tradisional negara tujuan (AS, Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa), sementara diversifikasi pasar dan produk ekspor belum optimal, dan UPI terutama yang berskala mikro kecil belum menerapkan prinsip mutu produk ekspor yang baik. Hal ini perlu dipecahkan secara komprehensif, dimana perundingan penyelesaian hambatan ekspor, harus dibarengi dengan upaya peningkatan mutu produk ekspor dan pengembangan intelijen pasar yang membantu diversifikasi pasar produk perikanan dan kelautan. Kedutaan Besar RI dan Perwakilan Dagang RI di luar negeri (*Indonesia Trade Promotion Center*) dapat membantu dari segi diplomasi.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang pengolahan, pengetahuan tentang mutu dan dinamika pasar menjadi permasalahan dan tantangan lain yang harus dipecahkan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terutama di pasar ekspor. Saat ini baru tersedia 190 Pembina Mutu dan 264 Analis Pasar Hasil Perikanan di seluruh Indonesia, padahal posisinya sangat vital sebagai pelopor mutu dan pengembangan pasar terutama di wilayah Indonesia yang aksesnya terbatas. Pembina Mutu dan Analis Pasar Hasil Perikanan akan menjembatani penyediaan produk kelautan dan perikanan yang berkualitas dengan jaringan logistik dan pasar potensial di dalam dan luar negeri. Dalam konteks pengembangan SDM pengolahan, pelaku UPI perlu diberikan pengetahuan berkaitan dengan standar mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*) dan informasi pasar sehingga terjadi konsistensi dalam penyediaan produk kelautan dan perikanan berkualitas yang dibutuhkan pasar. Pembina Mutu dan Analis Pasar Hasil Perikanan membantu hal tersebut di lapangan, sementara pada lingkup yang lebih

luas, Ditjen PDSPKP dapat mengakomodasi melalui pengembangan sertifikasi kesesuaian mutu, fasilitasi prasarana dan sarana pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran, fasilitasi promosi dan pameran produk kelautan dan perikanan, serta fasilitasi kesepakatan pemasaran produk kelautan dan perikanan di pasar potensial dalam dan luar negeri.

A. Tantangan *Global Market Demand*

Permintaan global terhadap produk-produk *seafood* dipenuhi melalui jaringan perdagangan yang kompleks dan tersebar di berbagai belahan dunia. Seiring dengan meningkatnya populasi dan kesadaran konsumen terhadap pola makan sehat, permintaan ini terus tumbuh, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi industri perikanan global. Pada tahun 2024, total nilai impor produk perikanan dunia mencapai USD 183,97 miliar, mengalami penurunan 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, rata-rata pertumbuhan impor perikanan dari 2020 hingga 2024 sebesar 5,3% menunjukkan potensi perkembangan yang berkelanjutan. Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang menjadi importir terbesar (Gambar 1.15).



Gambar 1.15. Nilai Impor Perikanan Dunia Tahun 2020-2024
Sumber: Ditjen PDSPKP, 2025

Uni Eropa mendominasi pasar global dengan nilai impor USD 61,52 miliar, meski pertumbuhannya minus 1,4% (YoY). Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan USD 27,43 miliar, naik 0,2%. Tiongkok dan Jepang juga berkontribusi signifikan dengan nilai impor masing-masing USD 22,60 miliar dan USD 13,57 miliar, keduanya mengalami penurunan masing-masing 3,1% dan 5,6% dari tahun sebelumnya (YoY) seperti pada Gambar 1.16. berikut.

Negara	Nilai (USD Miliar)	Share	Tren (YoY)
 Uni Eropa*	61,52	33,4%	-1,4%
 Amerika Serikat	27,43	14,9%	0,2%
 Tiongkok	22,60	12,3%	-3,1%
 Jepang	13,57	7,4%	-5,6%
 ASEAN	11,18	6,1%	-3,1%

Ket: *) termasuk perdagangan intra-trade

Gambar 1.16. Top Negara Importir Dunia Tahun 2024
Sumber: Ditjen PDSPKP, 2025

Pada tahun 2024, impor perikanan dunia didominasi oleh komoditas salmon dan trout, dengan nilai mencapai USD 37,21 miliar, mencakup 20,2% dari total perdagangan perikanan global, meskipun turun 1,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas udang berada di posisi kedua dengan nilai USD 25,90 miliar, menyumbang 14,1%, namun mengalami penurunan sebesar 4,9%. Tuna-tongkol-cakalang mencatat nilai impor USD 16,22 miliar (8,8% dari total), meningkat 1,9%. Cumi-sotong-gurita mencatat impor USD 11,27 miliar (6,1% dari total), meskipun turun 1,2%. Tepung-pelet ikan berkontribusi USD 6,50 miliar (3,5%), dengan penurunan 0,8%. Nilai impor kepiting atau rajungan sebesar USD 6,19 miliar (3,4%), naik 4,1%. Lobster mencatat impor USD 5,61 miliar (3,0%), dengan kenaikan 10,2%.

Komoditas	Nilai (USD Miliar)	Share	Tren (YoY)
Salmon-Trout	37,21	20,2%	-1,1%
Udang	25,90	14,1%	-4,9%
Tuna-Cakalang-Tongkol	16,22	8,8%	1,9%
Cumi-Sotong-Gurita	11,27	6,1%	-1,2%
Tepung-Pellet Ikan	6,50	3,5%	-0,8%
Kepiting-Rajungan	6,19	3,4%	4,1%
Lobster	5,61	3,0%	10,2%

Gambar 1.17. Dominasi Komoditas Impor Perikanan Dunia
Sumber: Ditjen PDSPKP, 2025

Saat ini, negara-negara eksportir terbesar di dunia adalah Tiongkok, Norwegia, Ekuador, dan Vietnam. Tiongkok mendominasi dengan nilai ekspor sebesar USD 20,92 miliar, mencakup 11,2% dari total perdagangan dunia, naik 1,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Norwegia berada di posisi kedua dengan nilai ekspor USD 16,07 miliar (8,6% dari total) dan mencatat pertumbuhan positif meskipun sangat kecil. Ekuador dan Vietnam masing-masing mencatat nilai ekspor USD 9,24 miliar (5,0%) dan USD 8,82 miliar (4,7%), dengan Ekuador mengalami kenaikan 2,3%, sementara Vietnam turun 7,1%. Indonesia berada di peringkat ke-10 dengan nilai ekspor USD 5,9 miliar, berkontribusi 3,2% terhadap total perdagangan perikanan dunia.

Negara	Nilai (USD Miliar)	Share	Tren (YoY)
 Tiongkok	20,92	11,2%	1,1%
 Norwegia	16,07	8,6%	0,0%
 Ekuador	9,24	5,0%	2,3%
 Vietnam	8,82	4,7%	-7,1%
 Chili	8,74	4,7%	-1,8%

*Indonesia Peringkat-10 dengan share 3,2%, naik dari peringkat-13 tahun 2023

Gambar 1.18. Top Negara Pemasok Dunia Tahun 2024
Sumber: Ditjen PDSPKP, 2025

Beberapa komoditas unggulan ekspor Indonesia masih menghadapi tantangan di pasar global, dengan pangsa pasar yang relatif kecil dan kalah bersaing dibandingkan negara-negara lain. Salah satu contohnya adalah udang, yang menjadi andalan ekspor Indonesia dengan kontribusi sebesar 28,2% dari total ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2024. Meskipun demikian, Indonesia hanya berada di peringkat kelima sebagai eksportir udang utama dunia, di bawah Ekuador yang memiliki pangsa pasar 25,5%, India (17,3%), Vietnam (10,3%), dan Tiongkok (6,8%).

Ekspor udang Indonesia juga tengah menghadapi tantangan di pasar Amerika Serikat, yang merupakan importir udang terbesar di dunia. Pihak Otoritas Amerika Serikat telah menetapkan bahwa industri udang domestik Amerika Serikat dirugikan secara material akibat importasi udang beku dari Indonesia (*Anti-Dumping/AD*) dan importasi udang dari Ekuador, India, dan Vietnam (*Countervailing Duties/CVD*). Berdasarkan hal ini mulai akhir Desember 2024, semua eksportir udang beku dari Indonesia dikenakan tambahan bea masuk berupa *dumping rate* sebesar 3,9%. Hanya terdapat 1 (satu) perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban bea masuk dumping, sedangkan untuk Ekuador, India dan Vietnam, masing masing mendapatkan tarif bea masuk imbalan/CVD sebesar 3,78%, 5,77%, dan 2,84%. Selain itu, Indonesia juga belum terdaftar sebagai negara yang dapat mengekspor udang hasil tangkapan (*certified nation*) ke Amerika Serikat, yang menyebabkan kendala tambahan bagi ekspor udang Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia merupakan produsen utama tuna-cakalang-tongkol dunia, dengan produksi mencapai 1,44 juta ton pada tahun 2024. Namun, kontribusi besar ini belum tercermin dalam pangsa pasar tuna-cakalang-tongkol Indonesia di dunia. Pada tahun 2024, Indonesia hanya menempati peringkat kelima eksportir utama tuna-cakalang-tongkol dengan pangsa pasar 6,3% atau setara dengan USD 1,01 miliar, masih di bawah Thailand (16,1%), Ekuador (10,1%), Tiongkok (8,9%), dan Spanyol (8,3%).

Tantangan lainnya datang dari pengenaan tarif tinggi untuk produk olahan (*tariff escalation*) oleh Uni Eropa dan Jepang, yang merupakan

importir utama tuna-cakalang-tongkol dunia. KKP terus melakukan negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut. Melalui forum *Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA) yang ditandatangani pada 8 Agustus 2024, disepakati penurunan tarif 4 (empat) post tarif untuk tuna-cakalang-tongkol kaleng dan olahan lainnya menjadi 0%, yang ditargetkan berlaku efektif pada triwulan I tahun 2026. Negosiasi serupa berlangsung dalam forum *Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA), yang bertujuan menurunkan tarif impor produk perikanan Indonesia termasuk tuna olahan sampai dengan 0% baik secara langsung maupun gradual.

Indonesia juga hanya menempati peringkat keempat sebagai eksportir global untuk komoditas cumi-sotong-gurita dan rajungan-kepiting. Pada tahun 2024, ekspor cumi-sotong-gurita Indonesia mencapai USD 0,87 miliar dengan pangsa pasar 7,1%, berada di bawah Tiongkok (29,5%), Spanyol (10,8%), dan Maroko (8,5%). Sementara itu, ekspor rajungan-kepiting Indonesia mencapai USD 0,45 miliar dengan pangsa pasar 7,2%, dibawah Rusia (30,9%), Kanada (18,1%), dan Tiongkok (10,3%).

Namun, Indonesia memiliki posisi yang lebih baik sebagai eksportir rumput laut. Pada tahun 2024, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai eksportir rumput laut dunia dengan nilai ekspor sebesar USD 0,34 miliar dan pangsa pasar 11,4%, hanya kalah dari Tiongkok yang memiliki pangsa pasar 23,2% dan Korea Selatan 16,9%. Potensi peningkatan ekspor rumput laut Indonesia sangat besar, terutama karena ekspor saat ini didominasi oleh rumput laut kering dengan kontribusi 56,3%, yang sebagian besar diekspor ke Tiongkok. Produksi karaginan Tiongkok sangat bergantung pada bahan baku impor dari Indonesia, khususnya *Kappaphycus alvarezii* (*Cottonii*) dan *Eucheuma denticulatum* (*Spinosum*), dengan volume impor sebesar 117.004 ton atau setara dengan 92,8% dari total impor *Dried Eucheuma* oleh Tiongkok. Posisi komoditas utama Indonesia di pasar global tahun 2024 terdapat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Posisi Komoditas Utama Indonesia di Pasar Global Tahun 2024

No	Komoditas Utama Indonesia	Ekspor Indonesia (USD Miliar)	Impor Dunia (USD Miliar)	Pangsa Pasar Indonesia (%)	Peringkat Dunia
1	Udang	1,68	25,90	6,0%	Peringkat 5 setelah Ekuador (1); India (2); Vietnam (3); dan Tiongkok (4)
2	Tuna-Cakalang-Tongkol	1,03	16,27	6,3%	Peringkat 5 setelah Thailand (1); Ekuador (2); Tiongkok (3); dan (4) Spanyol

No	Komoditas Utama Indonesia	Ekspor Indonesia (USD Miliar)	Impor Dunia (USD Miliar)	Pangsa Pasar Indonesia (%)	Peringkat Dunia
3	Cumi-Sotong-Gurita	0,87	11,27	7,1%	Peringkat 4 setelah Tiongkok (1); Spanyol (2); dan Maroko (3)
4	Rajungan-Kepiting	0,51	6,20	8,1%	Peringkat 4 setelah Rusia (1); Kanada (2); dan Tiongkok (3)
5	Rumput Laut	0,34	3,18	11,4%	Peringkat 3 setelah Tiongkok (1) dan Korea Selatan (2)

Sumber: BPS 2025. diolah Ditjen PDSPKP; dan ITC Trademap 2025 diunduh tanggal 1 Juli 2025

Tantangan lainnya pada industri perikanan Indonesia adalah masalah keamanan pangan, dimana kontaminasi oleh bakteri patogen seperti *Salmonella sp.*, *Listeria sp.*, dan *Vibrio sp.* dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen. Kontaminasi ini bisa terjadi sepanjang rantai pasok, mulai dari lingkungan alam, selama proses penangkapan, hingga tahap pengolahan dan distribusi. Di samping itu, munculnya produk substitusi berbasis sel dan tumbuhan juga menjadi tantangan baru bagi industri perikanan tradisional. Produk-produk ini semakin dilirik karena dianggap lebih berkelanjutan dan etis, mengingat proses produksinya tidak melibatkan penangkapan ikan dan dapat dirancang untuk memiliki profil nutrisi yang lebih baik. Walaupun saat ini produk substitusi tersebut masih dalam tahap pengembangan, potensi pertumbuhannya sangat besar dan bisa menjadi pesaing serius bagi produk perikanan konvensional di masa depan.

Hambatan ekspor non tarif lainnya yang saat ini dihadapi oleh Indonesia adalah ditemukannya kandungan *Radionuklida Cesium 137* (Cs-137) pada produk udang yang di ekspor ke Amerika Serikat, hal ini menjadikan *United States Food and Drug Administration* (USFDA) menerbitkan *import alert* untuk udang Indonesia yang berasal dari UPI tertentu, sehingga harus diterbitkan sertifikat tambahan yang menjamin bahwa udang Indonesia bebas kandungan Cs-137 untuk dapat masuk ke pasar Amerika Serikat. Selain isu Cs-137, Indonesia juga harus berhadapan dengan larangan impor masuk ke pasar Uni Eropa untuk produk perikanan budi daya mulai 3 September 2026 berdasarkan *EU Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2598* terkait larangan penggunaan produk obat antimikroba tertentu. Indonesia harus memastikan bahwa produk budidaya tidak mengandung produk obat antimikroba yang dilarang untuk ekspor ke pasar Uni Eropa.

Disamping itu pada bulan Agustus tahun 2025, Indonesia juga dikenakan tarif resiprokal sebesar 19% termasuk produk perikanan yang

di ekspor ke Amerika Serikat. Tambahan tarif bea masuk ini menambahkan tekanan pada daya saing produk perikanan ke Amerika Serikat setelah sebelumnya terkena tarif dumping 3,9%.

Berbagai hambatan ekspor baik tarif dan non tarif di atas dikeluarkan oleh negara yang menjadi tujuan ekspor utama Indonesia yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pemerintah harus merespon dengan cepat dan tepat dengan menyusun berbagai langkah perbaikan baik yang sifatnya teknis maupun penguatan diplomasi. Pada masa mendatang, hambatan non tarif akan menjadi *trade barrier* yang lebih dominan, mulai dari isu keamanan pangan, keberlanjutan, konservasi, perlindungan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, pemerintah akan terus memperjuangkan penghapusan atau eliminasi tarif bea masuk melalui berbagai perundingan perdagangan bebas dengan mitra dagang baik secara bilateral, regional dan multilateral untuk menjadikan daya saing hasil perikanan Indonesia lebih kompetitif di pasar global.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, sektor kelautan dan perikanan Indonesia perlu terus berinovasi dan meningkatkan standar kualitas, sekaligus memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri perikanan global, sekaligus mendorong keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor ini. Potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam produksi rumput laut, tuna, dan komoditas perikanan lainnya harus dioptimalkan untuk memenuhi permintaan pasar global yang terus berkembang, sambil tetap menjaga kelestarian sumber daya laut yang ada.

B. Lingkungan Strategis

Pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 mempunyai indikator/tujuan utama, yaitu terjadinya:

- a. peningkatan ekspor produk kelautan dan perikanan; dan
- b. peningkatan AKI nasional.

Selain dipengaruhi oleh kondisi internal yang ada, pencapaian tujuan tersebut juga akan menghadapi berbagai kondisi lingkungan eksternal dan rangkaian peristiwa yang terjadi di tingkat nasional dan global. Secara umum, kondisi lingkungan tersebut bersifat kompleks, penuh perubahan, penuh persaingan, penuh risiko, dan penuh tuntutan. Untuk menghadapinya, diperlukan strategi baru, cara baru, dan nilai-nilai baru yang inovatif dan unggul dalam memberi solusi yang dibutuhkan.

Bagian berikut menyajikan hasil analisis terhadap kondisi internal dan kondisi lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029.

Beberapa kondisi internal yang diduga dapat memengaruhi pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah:

- 1) sistem bisnis perikanan;
- 2) komitmen terhadap pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan dan pengembangan standar termasuk SNI;
- 3) peningkatan nilai tambah produk perikanan yang merupakan bagian visi dan misi pemerintah;
- 4) kemitraan usaha dan literasi keuangan serta akses pembiayaan melalui kredit program seperti KUR;
- 5) sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional; dan
- 6) upaya peningkatan konsumsi dalam negeri produk kelautan dan perikanan.

Secara umum, kondisi eksternal yang berpengaruh dibagi dua, yaitu kondisi lingkungan eksternal tingkat nasional dan kondisi lingkungan eksternal tingkat global. Kondisi lingkungan eksternal tingkat nasional yang diduga dapat memengaruhi pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan, diantaranya adalah:

- 1) hilirisasi sumber daya alam termasuk sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 2) swasembada pangan yang terkait erat dengan kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian pangan;
- 3) pengembangan Koperasi Desa Merah Putih yang juga diadopsi oleh KKP untuk memperkuat program pembangunan nasional khususnya di bidang kelautan dan perikanan;
- 4) Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan kampung-kampung di sektor kelautan dan perikanan lainnya yang berbasis wilayah;
- 5) Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu peluang pemasaran produk perikanan, khususnya penyediaan protein;
- 6) percepatan penurunan *stunting*;
- 7) penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi yang merupakan arahan presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) tahun 2023;
- 8) perbaikan iklim usaha yang kondusif, melalui fasilitasi pajak penghasilan dan fasilitasi pajak sektor kelautan dan perikanan;
- 9) peningkatan kualitas SDM dan mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional;

- 10) peningkatan akses pasar dan perlindungan/pengamanan kepentingan nasional yang ditopang oleh seluruh kementerian/lembaga (K/L);
- 11) optimalisasi pasar-pasar ikan tradisional pada aspek sarana, prasarana, layanan dan kelembagaan sebagai pusat pemasaran ikan, wisata kuliner, edukasi gizi, dan sumber protein pilihan masyarakat;
- 12) penerapan teknologi prasarana dan sarana ramah lingkungan yang mendukung efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon serta keberlanjutan sumberdaya sebagai tuntutan dari kesepakatan global;
- 13) Penguatan bersama mitra global untuk interoperabilitas antar platform ketertelusuran produk perikanan sebagai agenda internasional (*Food and Agriculture Organization* (FAO) dan kerja sama regional ASEAN);
- 14) penguatan ekosistem pembiayaan usaha kecil menengah dan koperasi melalui ekspansi KUR sektor perikanan, pembiayaan ultra mikro, dan akses permodalan berbasis kelompok usaha nelayan serta koperasi perikanan; dan
- 15) peningkatan program literasi keuangan nasional oleh K/L, OJK, dan industri keuangan yang menjadi peluang bagi sektor kelautan dan perikanan untuk memperkuat kapasitas manajerial pelaku usaha dan mendorong formalitas finansial.

Selanjutnya, kondisi lingkungan eksternal tingkat global yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029, diantaranya adalah:

- 1) *market size* (pasar domestik dan antar negara) produk perikanan global meningkat dari perkiraan USD 333,25 miliar pada tahun 2022 menjadi USD 605,46 Miliar pada tahun 2029 dengan CAGR 8,92%. Peningkatan tersebut diduga akibat terjadinya perubahan konsumsi masyarakat menuju pola makan sehat (*Fortune Business Insights*);
- 2) perang dagang atau *trade war* utamanya antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dapat mempengaruhi dinamika dan *volatility* perdagangan global. Selain itu sikap unilateral Amerika Serikat untuk mengenakan tarif resiprokal kepada negara-negara yang dianggap ancaman bagi perdagangan Amerika Serikat;
- 3) ketegangan perang di timur tengah seperti Israel, Palestina, Lebanon, Iran, dan Yaman, konflik perang Rusia dan Ukraina, dapat memicu gejolak pasar global, disrupti jalur logistik, stok cadangan pangan dunia, potensi resesi dan keamanan global;
- 4) perundingan Indonesia-Jepang (IJ-EPA) menyepakati tarif bea masuk sampai dengan 0% untuk lebih dari 100 pos tarif, termasuk 4 pos tarif olahan tuna;
- 5) perundingan Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) menyepakati tarif bea masuk sampai dengan 0% untuk lebih dari 500 pos tarif. Implementasi tarif ini menunggu finalisasi penandatanganan perjanjian sebelum *entry into force*;

- 6) perundingan Indonesia-Canada CEPA dan Indonesia Peru CEPA telah selesai dan diperkirakan dapat implementasi pada 2026, sehingga membuka peluang peningkatan akses pasar hasil perikanan Indonesia ke Pasar Amerika Utara dan Amerika Selatan;
- 7) pasar potensial yang terbuka di Korea Selatan, Timur Tengah, dan di kalangan negara yang tergabung dalam *Eurasian Economic Union*; dan
- 8) persyaratan pasar global terutama terkait *quality, safety, traceability*, dan *sustainability*.

Selain lingkungan strategis tersebut, tren global yang kemudian menjadi paradigma atau nilai-nilai baru juga dapat berpengaruh. Salah satunya terkait “*Sustainable Blue Food*”, dimana aspek keberlanjutan dalam penyediaan bahan pangan dari sebelumnya hanya tren telah berubah menjadi persyaratan di pasar pangan global. Di tingkat global, terdapat kecenderungan peningkatan standar pembiayaan hijau (*green financing*) dan insentif investasi berkelanjutan, yang dapat membuka peluang bagi usaha perikanan ramah lingkungan untuk memperoleh pendanaan internasional. Beberapa indikasi yang menunjukkan hal ini adalah:

- 1) semakin banyak negara yang melaksanakan “*sustainability policies*”;
- 2) banyaknya kerangka kerja/komitmen internasional tentang keberlanjutan, dalam bentuk *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), protocol, dan kesepakatan konvensi;
- 3) meningkatnya tuntutan/permintaan konsumen global terhadap *sustainable blue food*;
- 4) banyaknya inovasi dan riset terkait pengadaan sumber pangan berkelanjutan; dan
- 5) berkembangnya kegiatan bisnis yang dikelola secara bertanggung jawab dan menuntut efisiensi, misalnya dengan menerapkan *circular economy*, *carbon neutral*, dan *corporate social responsibility* (CSR).

Dalam lingkup nasional, hilirisasi bisnis dan kecukupan pangan telah berubah paradigmanya menjadi komitmen nasional. Beberapa kondisi yang menunjukkan hal ini diantaranya:

- 1) peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan melalui pengembangan kebijakan penangkapan ikan terukur, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (hulu-hilir) dan peningkatan budi daya perikanan melalui modelling, pengembangan kampung budi daya perikanan, serta revitalisasi tambak non produktif yang dibarengi dengan penguatan ekosistem logistik untuk penguatan tata kelola dan hilirisasi perikanan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan devisa;
- 2) hilirisasi sektor perikanan dan perkebunan, padahal sebelumnya hanya ditujukan untuk sektor mineral;

- 3) komitmen pemerintah untuk swasembada pangan, salah satunya di sektor kelautan dan perikanan;
- 4) program MBG yang menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kecukupan pangan dan gizi; dan
- 5) Program pengembangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat pembangunan ekonomi berbasis desa termasuk di sektor kelautan dan perikanan.

Kondisi internal, lingkungan eksternal strategis, dan paradigma baru tersebut akan berpengaruh langsung dan nyata terhadap pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan, dengan intensitas yang berbeda-beda. Dampak pengaruh tersebut bisa positif dan negatif, tergantung langkah antisipasi dan strategi yang dipersiapkan untuk menghadapinya. Strategi kebijakan Bab 4 diarahkan untuk memberi solusi terbaik yang dibutuhkan, sehingga tujuan pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan yaitu peningkatan ekspor produk kelautan dan perikanan dan angka konsumsi ikan nasional dapat tercapai secara maksimal.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Visi

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025–2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025–2029 serta Visi KKP 2025–2029. Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi Presiden dan Wakil Presiden ini juga didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk tahap penguatan fondasi transformasi tahun 2025–2029, KKP dalam Rencana Strategis tahun 2025–2029 menetapkan visi: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai organisasi yang berada di bawah Presiden dan KKP, maka Ditjen PDSPKP mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta Visi KKP. Pada periode 2025–2029, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menetapkan Visi “Terwujudnya Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai Pilar Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”.

Untuk mendukung agenda pembangunan/penguatan transformasi, Ditjen PDSPKP mendukung 2 arah kebijakan KKP yaitu sebagai berikut:

- a) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; dan
- b) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi dan dua agenda pembangunan/penguatan transformasi yang didukung, maka Ditjen PDSPKP perlu menentukan misi yang akan dilakukan untuk tahun 2025–2029. Misi Ditjen PDSPKP akan mendukung Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta Misi KKP.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, KKP berkomitmen untuk mendukung tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta

Cita ke-2, ke-5, dan ke-8. Misi tersebut dirumuskan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Dari empat misi KKP tersebut, Ditjen PDSPKP mendukung dua misi, yaitu:

- a. Mengembangkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas

Adapun Misi Ditjen PDSPKP 2025–2029 dalam mendukung Misi KKP adalah :

1. Mengakselerasi hilirisasi produk kelautan dan perikanan; dan
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

C. Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2025–2029. Mengacu Rencana Strategis (Renstra) KKP Tahun 2025–2029, ada empat tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025–2029, yaitu:

1. meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Dari 2 Misi Ditjen PDSPKP tersebut, yang menjadi tujuan dari pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses pasar produk kelautan dan perikanan di pasar dalam dan luar negeri serta usaha pengolahan dan pemasaran.

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:

- a. Target Indikator Nilai Ekspor Rumput Laut tahun 2025 sebesar USD 574 juta dan meningkat sebesar USD 898 juta pada tahun 2029;
 - b. Target Indikator Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya tahun 2025 sebesar USD 5,68 miliar dan meningkat sebesar USD 7,60 miliar pada tahun 2029;
 - c. Target Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri tahun 2025 sebesar Rp310,51 triliun dan meningkat sebesar Rp352,01 triliun pada tahun 2029;
 - d. Target Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas tahun 2025 sebesar 5% dan meningkat sebesar 7% pada tahun 2029.
2. Mewujudkan tata kelola birokrasi yang efisien, profesional, dan berorientasi hasil dalam mendukung penguatan daya saing sektor kelautan dan perikanan.

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:

Target Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2025 sebesar 86 dan meningkat sebesar 88 pada tahun 2029.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis (SS) pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PDSPKP sebagai *outcome/impact* dari program-program yang dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP pada tahun 2025–2029. Sebagai organisasi di bawah KKP, sasaran strategis Ditjen PDSPKP melekat pada sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:

1. SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut
2. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional
4. SS-4 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
5. SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas

Dari lima sasaran strategis tersebut, Ditjen PDSPKP mendukung secara langsung dua sasaran strategis, yaitu SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional, serta SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas.

A. SS-3 “Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional”

SS-3 yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional”, dengan indikator kinerja:

1. nilai ekspor hasil perikanan dari USD 6,25 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 8,5 miliar pada tahun 2029; dan
2. KIM dari 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 menjadi 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029.

Sasaran Program “Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing” dengan indikator program:

1. nilai Ekspor Rumput Laut dari USD 574 juta pada tahun 2025 menjadi USD 898 juta pada tahun 2029;
2. nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya dari USD 5,68 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 7,60 miliar pada tahun 2029;
3. nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri dari Rp310,51 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp352,01 triliun pada tahun 2029; dan
4. persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas dari 5% pada tahun 2025 menjadi 7% pada tahun 2029.

Adapun sasaran kegiatan Ditjen PDSPKP periode 2025–2029 adalah:

1. meningkatnya pangsa pasar produk olahan rumput laut;
2. meningkatnya akses dan promosi kelautan dan perikanan di luar negeri;
3. terkendalinya neraca perdagangan hasil perikanan;
4. meningkatnya utilitas industri pengolahan produk kelautan dan perikanan;
5. meningkatnya investasi kelautan dan perikanan;
6. meningkatnya ketertelusuran dan logistik ikan;
7. meningkatnya kontribusi protein ikan dalam pemenuhan protein hewani;
8. tersedianya rekomendasi kebijakan pengembangan sektor kelautan dan perikanan berdasar preferensi konsumen;
9. meningkatnya produksi olahan kelautan dan perikanan;
10. meningkatnya pemanfaatan prasarana dan sarana Logistik;
11. meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang memenuhi standar pengujian; dan
12. meningkatnya UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas.

B. SS-5 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”

SS-5, yang akan dicapai Adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas dengan indikator kinerja:

- Indeks RB KKP dari 90,05 pada tahun 2025, menjadi 90,25 pada tahun 2029.

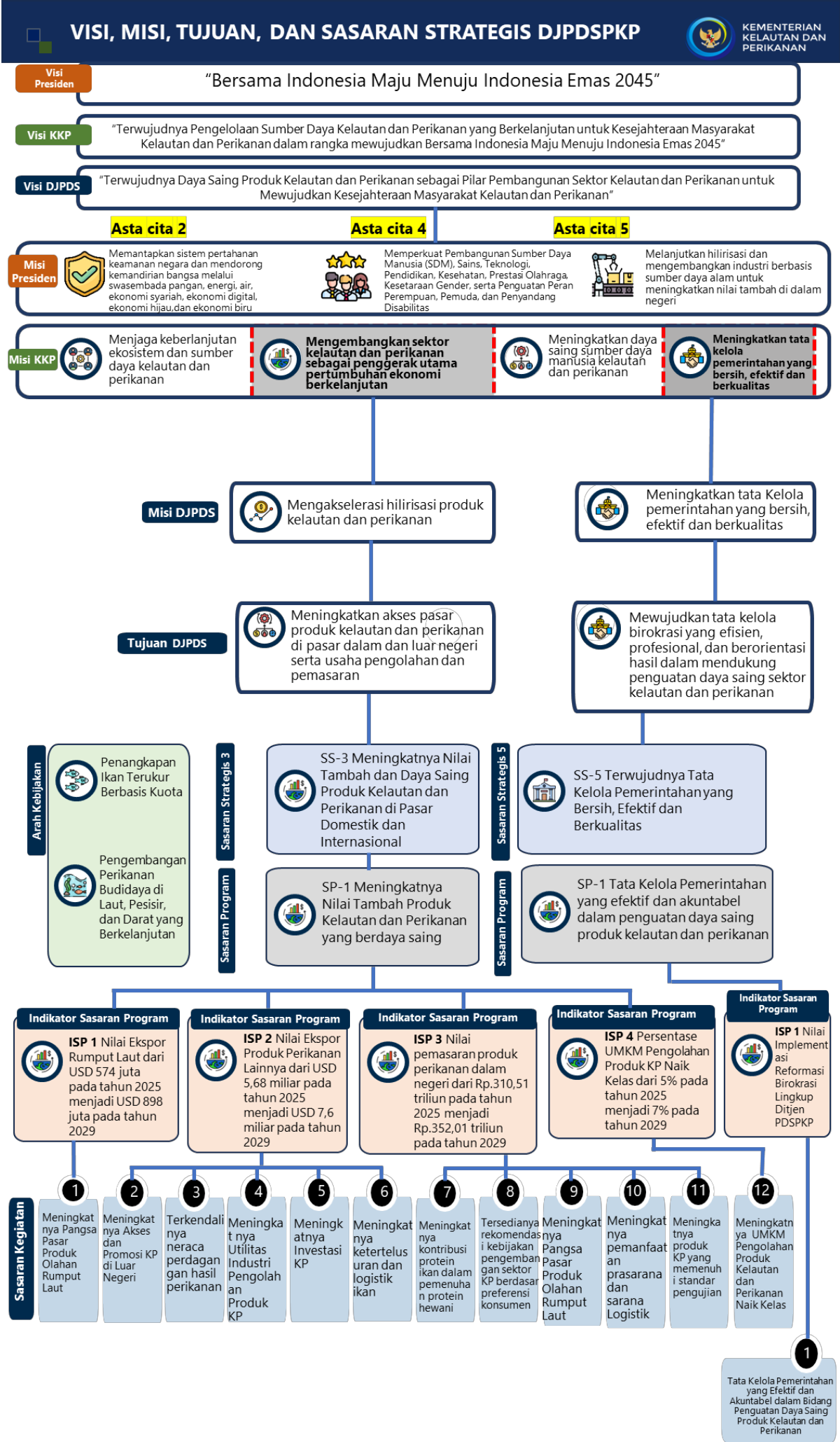
Sasaran Program “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan” dengan indikator program:

- Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP dari 86 nilai pada tahun 2025 menjadi 88 nilai pada tahun 2029.

Adapun sasaran kegiatan Ditjen PDSPKP periode 2025–2029 adalah “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan” dengan indikator kegiatan sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP dari 85% pada tahun 2025 menjadi 89% pada tahun 2029;
2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP dengan target <0,5% pada tahun 2025-2029;
3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen PDSPKP dari 81% pada tahun 2025 menjadi 85% pada tahun 2029;
4. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Ditjen PDSPKP dari 76 nilai pada tahun 2025 menjadi 80 nilai pada tahun 2029;
5. Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lingkup Ditjen PDSPKP dari 86 nilai pada tahun 2025 menjadi 86,8 nilai pada tahun 2029;
6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP dari 92 nilai pada tahun 2025 menjadi 92,25 nilai pada tahun 2029;
7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP dari 81,5 nilai pada tahun 2025 menjadi 82,5 nilai pada tahun 2029;
8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Ditjen PDSPKP dari 3,5 nilai pada tahun 2025 menjadi 3,9 nilai pada tahun 2029;
9. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil negara (ASN) Lingkup Ditjen PDSPKP dari 81 indeks pada tahun 2025 menjadi 83 indeks pada tahun 2029;
10. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan target 100% pada tahun 2025-2029;

11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Ditjen PDSPKP dari 80 nilai pada tahun 2025 menjadi 84 nilai pada tahun 2029;
12. Persentase rencana umum pengadaan barang/jasa (PBJ) yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lingkup Ditjen PDSPKP dari 76% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2029;
13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Lingkup Ditjen PDSPKP dari 65% pada tahun 2025 menjadi 85% pada tahun 2029;
14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP dari 77 nilai pada tahun 2025 menjadi 81 nilai pada tahun 2029;
15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP dari 91% pada tahun 2025 menjadi 95% pada tahun 2029;
16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Ditjen PDSPKP dengan target 12 layanan pada tahun 2025-2029;
17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Ditjen PDSPKP dengan target 100% pada tahun 2025-2029;
18. Persentase Dokumen Kerja Sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP dengan target 80% pada tahun 2025-2029; dan
19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan target $\leq 5\%$ pada tahun 2025-2029.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 merupakan integrasi antara kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 dengan visi, misi, dan program Presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. Pembangunan jangka panjang tahun 2025–2045 merupakan tahapan pembangunan yang berkesinambungan dimana tahun 2025–2029 merupakan tahap pertama Penguatan Transformasi. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 diuraikan berbagai upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045 yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Wilayah dan Prasarana Sarana, serta Kesinambungan Pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan penggabungan antara Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 Tahap I. RPJMN Tahun 2025–2029 menetapkan delapan Prioritas Nasional sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung Asta Cita. Prioritas Nasional tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan strategi renstra KKP 2025–2029.

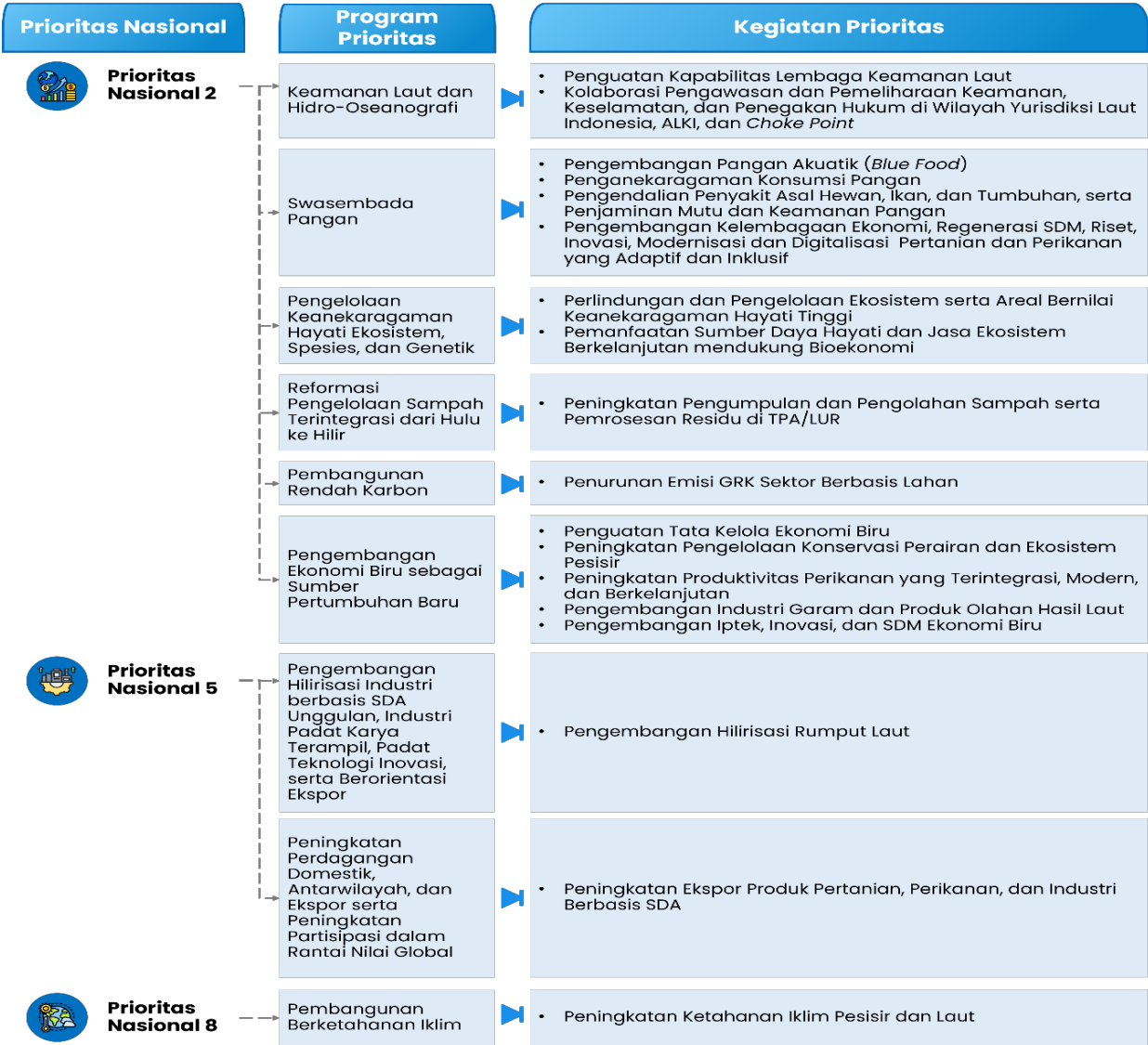
KKP juga berkontribusi dalam pencapaian kegiatan prioritas dalam RPJMN 2025–2029 pada Prioritas Nasional (Asta Cita) ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025–2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan pembangunan. PSN ditetapkan setiap tahun sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek

termasuk ketersediaan pendanaan, serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan PSN dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

- KKP merupakan salah satu K/L yang melaksanakan PSN yaitu:
1. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan di Bali;
 2. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura dengan fokus area Jawa Barat; dan
 3. Pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu di Maluku yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka mendukung PSN lainnya yaitu:

1. Program Hilirisasi Komoditas Rumput Laut; dan
2. Program Hilirisasi Garam melalui Proyek Pembangunan Soda Ash, KKP akan melakukan transformasi hulu untuk meningkatkan produksi rumput laut dan garam berkualitas secara berkelanjutan.



Gambar 3.1. Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas terkait Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2025-2029

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025–2029 disusun mengacu kepada Visi Indonesia Emas 2045, Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta agenda pembangunan/penguatan transformasi. Penyusunan kebijakan tersebut juga didasari oleh perubahan *mindset* pembangunan sektor kelautan dan perikanan dari pembangunan berorientasi produksi menjadi pendekatan pembangunan secara terukur yang berorientasi pada keberlanjutan ekologi perairan. Ada empat hal yang mendasari perubahan *mindset* tersebut, yaitu:

- sektor kelautan dan perikanan sebagai sistem utama pembangunan nasional;
- ekologi sebagai panglima;
- berorientasi pasar (*market driven oriented*); dan
- teknologi, inovasi, dan digitalisasi.



Gambar 3.2. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan Perikanan

Dengan memperhatikan arahan-arahan tersebut, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025–2029 adalah:

- memperluas kawasan konservasi laut;
- penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
- pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
- pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PDSPKP

Dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional pada Bagian A dan kebijakan KKP pada Bagian B, maka perlu disusun beberapa target capaian pada pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025–2029. Penyusunan target capaian ini juga memperhatikan Asta Cita Ke-2, Ke-4, dan Ke-5 Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029, agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, sasaran strategis KKP yang didukung Ditjen PDSPKP, serta tujuan pembangunan PDSPKP tahun 2025–2029 yang disampaikan pada Bab 2 dengan memperhatikan semua arahan tersebut, maka target capaian pada pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025–2029 yang kemudian menjadi arah kebijakan Ditjen PDSPKP pada tahun 2025–2029, dinyatakan:

“Kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan:

Mewujudkan produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berdaya saing di pasar domestik dan ekspor”

Kebijakan dan strategi tersebut akan diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan yang berbasis ekonomi biru, sehingga mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yang menjadikan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, serta sesuai dengan Visi KKP 2025-2029. Program dan kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025–2029 tersebut adalah:

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.
 - a) Kegiatan PDSPKP-1: Pemasaran, Akses, dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
 - b) Kegiatan PDSPKP-2: Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
 - c) Kegiatan PDSPKP-3: Pengelolaan Prasarana dan Sarana Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
 - d) Kegiatan PDSPKP-4: Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan
- b. Program Dukungan Manajemen. Program ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025–2029, yaitu:
 - a) Kegiatan PDSPKP-5: Dukungan Manajemen Ditjen PDSPKP

Program dan kegiatan tersebut sejalan dengan dua sasaran strategis yang didukung Ditjen PDSPKP yaitu SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional, dan SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas.

Untuk mendukung agenda pembangunan/penguatan transformasi, Ditjen PDSPKP mendukung 2 arah kebijakan KKP yaitu sebagai berikut:

- a) penangkapan ikan terukur berbasis kuota; dan
- b) pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan

Tabel 3.1. Strategi dan Langkah Operasional Ditjen PDSPKP 2025–2029

No.	Strategi*	Langkah Operasional
Kebijakan 2. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota		
1.	meningkatkan ekspor komoditas perikanan tangkap bernilai ekonomis tinggi	a. pembinaan pelaku usaha pemasaran; b. peningkatan akses pasar dan kerja sama luar negeri; c. pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan; d. pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; e. pengujian dan penilaian kesesuaian produk kelautan dan perikanan; f. diversifikasi dan inovasi hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah untuk pangan; g. diversifikasi dan inovasi hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah untuk non pangan; h. penguatan digitalisasi ketertelusuran produk perikanan nasional.
2.	mengatasi hambatan nontarif produk perikanan tangkap melalui kerja sama, diplomasi perdagangan, dan pemenuhan persyaratan pasar	a. pemetaan standar dan regulasi negara tujuan; b. identifikasi, analisis, dan harmonisasi peraturan dalam negeri yang berpotensi menghambat ekspor; c. analisis standar dan regulasi negara tujuan; d. harmonisasi standar dan regulasi dengan negara tujuan; e. monitoring dan fasilitasi penanganan hambatan ekspor (non tarif); f. diseminasi penanganan hambatan ekspor; g. penguatan digitalisasi ketertelusuran produk perikanan nasional.
3.	memperkuat peran data dan kemampuan intelijen pasar ekspor dan domestik	a. pemetaan preferensi dan perilaku konsumen dalam negeri; b. pemetaan pasar dan produk perikanan dalam negeri; c. pemetaan dan analisis pasar luar negeri; d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi pasar.
4.	memperkuat strategi promosi produk perikanan Indonesia di pasar ekspor;	a. partisipasi dalam pameran skala internasional; b. fasilitasi misi dagang dan <i>buyer mission</i>; c. penguatan branding produk kelautan

No.	Strategi*	Langkah Operasional
		dan perikanan; d. optimalisasi promosi dengan kantor perwakilan dagang, investasi Republik Indonesia di luar negeri; e. fasilitasi promosi investasi pada sektor kelautan perikanan; f. penguatan digitalisasi ketertelusuran produk perikanan nasional.
5.	diversifikasi pasar dan perluasan perdagangan ekspor produk perikanan tangkap melalui kesepakatan perdagangan bilateral maupun multilateral seperti kerja sama ekonomi dengan negara mitra dan kerja sama perdagangan strategis lainnya;	a. pembinaan pelaku usaha pemasaran; b. pengumpulan informasi, regulasi, dan hambatan ekspor lainnya terkait tarif; c. penyusunan kertas posisi runding akses pasar dan penanganan hambatan ekspor; d. pelaksanaan perundingan akses pasar dan hambatan (tarif) dengan negara mitra baik bilateral, regional, dan multilateral; e. penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama dengan organisasi internasional, negara mitra dagang/lembaga internasional lainnya; f. fasilitasi ekspor hasil perikanan; g. diseminasi dan evaluasi pemanfaatan hasil perundingan.
6.	penumbuhan eksportir baru termasuk penyelesaian moratorium penambahan eksportir di negara tujuan ekspor;	a. pembinaan pelaku usaha pemasaran; b. pelaksanaan perundingan akses pasar dan hambatan (tarif) dengan negara mitra baik bilateral, regional, dan multilateral; c. penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama dengan organisasi internasional dan negara mitra dagang/lembaga internasional lainnya; d. diversifikasi dan inovasi hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah untuk pangan; e. diversifikasi dan inovasi hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah untuk non pangan; f. pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan; g. pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; h. penerapan digitalisasi ketertelusuran produk perikanan nasional.
7.	hilirisasi dan industrialisasi komoditas perikanan tangkap termasuk	a. pembinaan pelaku usaha pemasaran; b. penguatan digitalisasi ketertelusuran produk perikanan nasional; c. pengembangan dan penerapan standar;

No.	Strategi*	Langkah Operasional
	penguatan industri pangan berbasis sumber daya laut dan perairan serta penyediaan prasarana dan sarana;	d. pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan; e. diversifikasi dan inovasi hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah untuk pangan; f. diversifikasi dan inovasi hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah untuk non pangan; g. pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan; h. pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; i. pengujian dan penilaian kesesuaian produk kelautan dan perikanan; j. standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana; k. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana.
8.	mengelola importasi hasil perikanan tangkap untuk menjaga daya saing produksi perikanan dalam negeri	a. penghitungan ketersediaan komoditas perikanan berdasarkan data produksi perikanan tangkap, perikanan budi daya, dan stok ikan; b. penghitungan kebutuhan komoditas perikanan berdasarkan kebutuhan ikan untuk kegiatan usaha dan konsumsi masyarakat; c. penyusunan neraca komoditas perikanan; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan neraca komoditas; e. pemantauan ketertelusuran produk perikanan nasional.
9.	memperluas akses pasar dalam negeri melalui peningkatan dan pemerataan konsumsi ikan masyarakat, berperan aktif dalam penanggulangan <i>stunting</i> , serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG);	a. peningkatan akses pasar dan kerja sama dalam negeri; b. gemarikan melalui kampanye peningkatan konsumsi ikan; c. optimalisasi pasar-pasar ikan tradisional pada aspek sarana, prasarana, layanan dan kelembagaan sebagai pusat pemasaran ikan, wisata kuliner, edukasi gizi, dan sumber protein pilihan masyarakat; d. keikutsertaan dalam pameran hasil kelautan dan perikanan skala nasional; e. penguatan <i>branding</i> produk perikanan pasar dalam negeri; f. penguatan forum peningkatan konsumsi ikan; g. fasilitasi kerja sama kelembagaan antar pemerintah/non pemerintah dalam

No.	Strategi*	Langkah Operasional
		rangka promosi hasil kelautan dan perikanan; h. pemberian menu ikan untuk mendukung program MBG; i. pemberian produk perikanan dan materi promosi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah, remaja produktif, dan masyarakat; j. pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan; k. pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; l. pengujian dan penilaian kesesuaian, penerapan standar produk kelautan dan perikanan; m. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana.
10.	memperkuat sistem logistik ikan nasional untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta memenuhi konsumsi ikan dalam negeri;	a. pengelolaan logistik ikan nasional antara lain pemetaan, analisis dan perencanaan logistik, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemantauan, informasi stok ikan, penguatan ekosistem logistik ikan, pembinaan pelaku usaha distribusi ikan, pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan melalui STELINA; b. perumusan standar prasarana dan sarana; c. penyusunan perencanaan prasarana dan sarana; d. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana; e. pendampingan pemanfaatan operasionalisasi prasarana dan sarana.
11.	meningkatkan investasi melalui fasilitasi perizinan dan kemudahan berusaha, penyiapan informasi peluang investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor, promosi investasi, dan pendampingan realisasi investasi;	a. pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi; b. perizinan berusaha subsektor pengolahan dan pemasaran ikan serta pendampingan investasi sektor kelautan dan perikanan.
12.	meningkatkan kelas usaha mikro dan kecil kelautan dan perikanan melalui fasilitasi literasi	a. fasilitasi pendampingan kewirausahaan dan pembentukan wirausaha baru bidang pengolahan dan pemasaran; b. fasilitasi literasi keuangan dan akses pembiayaan usaha kelautan dan

No.	Strategi*	Langkah Operasional
	keuangan, akses pembiayaan, kemitraan usaha, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.	perikanan; c. fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha dan kemitraan usaha; d. kurasi usaha pengolahan hasil perikanan.
Kebijakan 3. Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan		
1.	meningkatkan ekspor komoditas perikanan budi daya bernilai ekonomis tinggi;	a. pembinaan pelaku usaha pemasaran; b. peningkatan akses pasar dan kerja sama luar negeri; c. pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan; d. pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; e. pengujian dan penilaian kesesuaian produk kelautan dan perikanan; f. diversifikasi dan inovasi hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah untuk pangan; g. diversifikasi dan inovasi hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah untuk non pangan; h. penguatan digitalisasi ketertelusuran produk perikanan nasional.
2.	secara aktif terlibat dalam upaya negosiasi tarif dagang produk perikanan budi daya termasuk mendorong diplomasi ekonomi dan penyelesaian sengketa dagang;	a. pengumpulan informasi, regulasi, dan hambatan ekspor lainnya terkait tarif; b. penyusunan kertas posisi runding akses pasar dan penanganan hambatan ekspor
3.	mengatasi hambatan nontarif produk perikanan budi daya melalui kerja sama, diplomasi perdagangan, dan pemenuhan persyaratan pasar;	a. pemetaan standar dan regulasi negara tujuan; b. identifikasi, analisis dan harmonisasi peraturan dalam negeri yang berpotensi menghambat ekspor; c. analisis standar dan regulasi negara tujuan; d. harmonisasi standar dan regulasi dengan negara tujuan; e. monitoring dan fasilitasi penanganan hambatan ekspor (non tarif); f. diseminasi penanganan hambatan ekspor; g. penguatan digitalisasi ketertelusuran produk perikanan nasional.
4.	menurunkan tarif pada produk ekspor	a. pelaksanaan perundingan akses pasar dan hambatan (tarif) dengan negara

No.	Strategi*	Langkah Operasional
	perikanan budi daya ekonomis tinggi melalui perjanjian kerja sama dengan negara mitra strategis;	mitra baik bilateral, regional, dan multilateral; b. penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama dengan organisasi internasional, negara mitra dagang/lembaga internasional lainnya
5.	diversifikasi pasar dan perluasan perdagangan ekspor produk perikanan budi daya melalui kesepakatan perdagangan bilateral maupun multilateral;	a. pembinaan pelaku usaha pemasaran; b. pengumpulan informasi, regulasi, dan hambatan ekspor lainnya terkait tarif; c. penyusunan kertas posisi runding akses pasar dan penanganan hambatan ekspor; d. pelaksanaan perundingan akses pasar dan hambatan (tarif) dengan negara mitra baik bilateral, regional dan multilateral; e. penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama dengan organisasi internasional, negara mitra dagang/lembaga internasional lainnya; f. fasilitasi ekspor hasil perikanan; g. diseminasi dan evaluasi pemanfaatan hasil perundingan.
6.	hilirisasi dan industrialisasi perikanan budi daya untuk meningkatkan nilai tambah berdasarkan prinsip nirlimbah serta penyediaan prasarana dan sarana;	a. pembinaan pelaku usaha pemasaran; b. pengembangan dan penerapan standar; c. pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan; d. diversifikasi dan inovasi hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah untuk pangan; e. diversifikasi dan inovasi hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah untuk non pangan; f. pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan; g. pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; h. pengujian dan penilaian kesesuaian produk kelautan dan perikanan; i. standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana; j. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana.
7.	meningkatkan konsumsi ikan budi daya berbasis preferensi konsumsi lokal melalui edukasi dan kampanye gizi ikan kepada masyarakat,	a. peningkatan akses pasar dan kerja sama dalam negeri; b. gemarikan melalui kampanye peningkatan konsumsi ikan; c. keikutsertaan dalam pameran hasil kelautan dan perikanan skala nasional; d. penguatan branding produk perikanan

No.	Strategi*	Langkah Operasional
	dan diversifikasi produk olahan termasuk penanganan <i>stunting</i> serta membangun model kuliner pangan berbasis ikan budi daya;	pasar dalam negeri; e. penguatan forum peningkatan konsumsi ikan; f. fasilitasi kerja sama kelembagaan antar pemerintah/non pemerintah dalam rangka promosi hasil kelautan dan perikanan; g. pemberian menu ikan untuk mendukung program MBG; h. pemberian produk perikanan dan materi promosi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah, remaja produktif, dan masyarakat; i. diversifikasi dan inovasi hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah untuk pangan; j. pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan; k. pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; l. pengujian dan penilaian kesesuaian produk kelautan dan perikanan.
8.	meningkatkan akses pasar dalam negeri melalui <i>modeling outlet</i> pemasaran ikan dan pemasaran digital (<i>e-commerce</i> ikan segar/olahan);	a. pemetaan preferensi dan perilaku konsumen dalam negeri; b. pemetaan pasar dan produk perikanan dalam negeri; c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi pasar; d. standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana; e. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana.
9.	mengembangkan sentra atau pusat industri pengolahan ikan budi daya skala mikro kecil;	a. diversifikasi dan inovasi hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah untuk pangan; b. diversifikasi dan inovasi hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah untuk non pangan; c. pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan; d. pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; e. standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana; f. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana; g. fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha dan kemitraan usaha; h. kurasi usaha pengolahan hasil perikanan.

No.	Strategi*	Langkah Operasional
10.	memperkuat distribusi, ketersediaan, dan aksesibilitas produk perikanan budi daya melalui implementasi sistem logistik ikan nasional termasuk dukungan terhadap penyediaan menu ikan pada program MBG;	a. pengelolaan logistik ikan nasional antara lain pemetaan, analisis dan perencanaan logistik, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemantauan, penguatan ekosistem logistik ikan, pembinaan pelaku usaha distribusi ikan, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan; b. perumusan standar prasarana dan sarana; c. penyusunan perencanaan prasarana dan sarana; d. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana.
11.	meningkatkan investasi dalam negeri melalui fasilitasi perizinan dan kemudahan berusaha, penyiapan peluang informasi investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor, promosi investasi, dan pendampingan realisasi investasi;	a. pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi; b. perizinan berusaha subsektor pengolahan dan pemasaran ikan serta pendampingan investasi sektor kelautan dan perikanan.
12.	meningkatkan kelas usaha mikro dan kecil kelautan dan perikanan melalui fasilitasi literasi keuangan, akses pembiayaan, kemitraan usaha, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.	a. fasilitasi pendampingan kewirausahaan dan pembentukan wirausaha baru bidang pengolahan dan pemasaran; b. fasilitasi literasi keuangan dan akses pembiayaan usaha kelautan dan perikanan; c. fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha dan kemitraan usaha; d. kurasi usaha pengolahan hasil perikanan; e. fasilitasi pengembangan usaha melalui Inkubasi Bisnis.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih baik, pemerintah telah mengidentifikasi lima arah kebijakan pengarusutamaan yang bersifat inovatif dan adaptif. Kelima arah kebijakan ini saling terkait dan bertujuan untuk menciptakan sektor kelautan dan perikanan yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan serta menjadi landasan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Gender dan Inklusi Sosial

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dimana Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PUG, agar setiap unit organisasi dapat menyusun perencanaan yang responsif gender melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup:

- a. penguatan tujuh prasyarat PUG, yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat;
- b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. penyiapan *roadmap* PUG;
- d. pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit kerja Eselon I di KKP dan antara pusat dan daerah;
- e. pembuatan profil gender;
- f. keberpihakan pemenuhan hak anak dan kaum rentan kelautan dan perikanan; dan
- g. monitoring dan evaluasi serta pengawasan PUG KKP.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan/*goal*, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar dimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB nomor 14, yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan pengendalian terhadap perubahan iklim;
- c. mengelola dan melindungi ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- d. meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e. mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- f. melestarikan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

- g. mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- h. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budi daya air, dan pariwisata berkelanjutan;
- i. meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;
- j. menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan
- k. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam *The United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

KKP juga mendukung pencapaian target TPB nomor 1 “Tanpa Kemiskinan” (*No Poverty*), nomor 2 “Tanpa Kelaparan” (*Zero Hunger*), nomor 7 “Energi Bersih dan Terjangkau” (*Affordable and Clean Energy*), nomor 8 “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi” (*Decent Work and Economic Growth*), nomor 9 “Industri, Inovasi, dan Infrastruktur” (*Industry Innovation and Infrastructure*), nomor 12 “Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab” (*Responsible Consumption and Production*), nomor 13 “Penanganan Perubahan Iklim” (*Climate Action*), dan nomor 17 “Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan” (*Partnership for the Goals*).

3. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek kemandirian ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, prasarana dan sarana, peningkatan kapasitas SDM dengan keahlian digital, kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* penerapan SPBE KKP termasuk penataan sistem perizinan berbasis web (*on-line*), serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

4. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon merupakan pendekatan yang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan, yakni dengan memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Indonesia telah menerapkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, yang memberikan nilai ekonomi terhadap setiap unit emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan

implementasi di berbagai sektor, termasuk sektor kelautan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025. Berdasarkan Permen tersebut, penyelenggaraan NEK di sektor kelautan dilakukan melalui mekanisme Perdagangan Karbon dan Pembayaran Berbasis Kinerja. Adapun lingkup dari penyelenggaraan NEK di sektor kelautan, antara lain pengelolaan karbon biru, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta kegiatan lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan untuk mendukung aktivitas pembangunan yang rendah emisi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah dan non-pemerintah. Keterlibatan pihak non-pemerintah terus didorong melalui inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan, serta investasi hijau yang berkelanjutan.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim menjadi strategi utama untuk menekan potensi penurunan PDB Dampak perubahan iklim yang berlangsung dalam kurun waktu yang relatif panjang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, penurunan hasil tangkapan nelayan, kehilangan mata pencaharian, serta serangan penyakit sensitif iklim. Implementasi pembangunan berketahanan iklim mendorong *multistakeholder* untuk peningkatan infrastruktur berketahanan iklim, penerapan teknologi, peningkatan tata kelola dan pendanaan iklim, serta peningkatan kapasitas pada masyarakat dan pemerintah.

6. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional bidang kelautan dan perikanan termasuk pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan, maka diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam Ditjen PDSPKP Tahun 2025–2029, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional dan Renstra KKP. Kerangka regulasi tersebut akan menaungi lima kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP Tahun 2025–2029. Adapun regulasi tersebut adalah:

- a. Regulasi terkait peningkatan pasar global, terdiri dari:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
 - b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2024.

- b. Regulasi terkait penguatan pembinaan mutu produk kualitas ekspor, terdiri dari:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Produk Hasil Perikanan Nonpangan dan Pengembangan Standar Mutu Hasil Perikanan;
 - d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan; dan
 - e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib.
- c. Regulasi terkait investasi dan pengembangan usaha, terdiri dari:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
 - b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-Daerah Tertentu pada Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
 - c) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kemitraan pada Bidang Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan.
- d. Regulasi terkait penguatan pembinaan mutu produk kualitas ekspor, terdiri dari:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;
 - b) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional; dan
 - c) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional.

Dalam Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025–2029, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional dan Renstra KKP, yang meliputi:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah:

- a. Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Urgensinya berdasarkan:
 - 1) tindak lanjut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; dan
 - 2) penyesuaian standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
2. Rancangan Peraturan Presiden yaitu:
 - a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Rencana Aksi Sistem Logistik Ikan Nasional Urgensinya berdasarkan:
 - 1) penguatan regulasi yang mengintegrasikan dan mensinergikan peran masing-masing kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan para pihak yang terkait tidak cukup diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional;
 - 2) tindak lanjut Usulan Perubahan Pasal 18 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; dan
 - 3) meningkatkan daya saing produk hasil perikanan di pasar domestik maupun global melalui penataan logistik ikan yang baik.
 - b. Rancangan Peraturan Presiden tentang *Public Service Obligation* dan Penugasan Operator Distribusi Ikan Urgensinya berdasarkan:
 - 1) jaminan ketersediaan bahan baku industri pengolahan Ikan dalam negeri dan pemenuhan konsumsi ikan dalam negeri dengan harga stabil berkonsekuensi terhadap kebutuhan PSO dan Penugasan Operator yang akan melaksanakan Distribusi Ikan; dan
 - 2) memperhatikan sistem logistik ikan bersifat multi *stakeholder*, multisektoral dan multilevel pemerintahan, maka penguatan regulasi yang mengintegrasikan dan menyinergikan peran masing-masing Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah dan para pihak yang terkait tidak cukup diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional.
 - c. Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Urgensinya berdasarkan:
 - 1) pengembangan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - 2) penguatan regulasi yang mengintegrasikan dan mensinergikan peran masing-masing Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah dan para pihak terkait yang tidak cukup diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk

Kelautan dan Perikanan (Perdirjen PDSPKP);

- 3) potensi sumber daya ikan dan kekayaan laut Indonesia dapat dijadikan sebagai modal untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional dalam rangka pembentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif dan berdaya saing, mengingat hingga saat ini Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi di masyarakat;
- 4) peningkatan konsumsi ikan nasional sangat penting sebagai penghela industri perikanan nasional dalam rangka meningkatkan produktivitas industri dan mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa;
- 5) manfaat dan keunggulan kandungan gizi ikan (protein, asam amino, omega, dan lain-lain) dan keragaman produk turunannya perlu dipromosikan kepada masyarakat melalui gemarikan; dan
- 6) kampanye Gemarikan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional untuk menyiapkan generasi bangsa yang sehat dan cerdas, serta menghela industri perikanan nasional perlu didukung seluruh komponen institusi/lembaga, pelaku usaha dan Masyarakat.

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

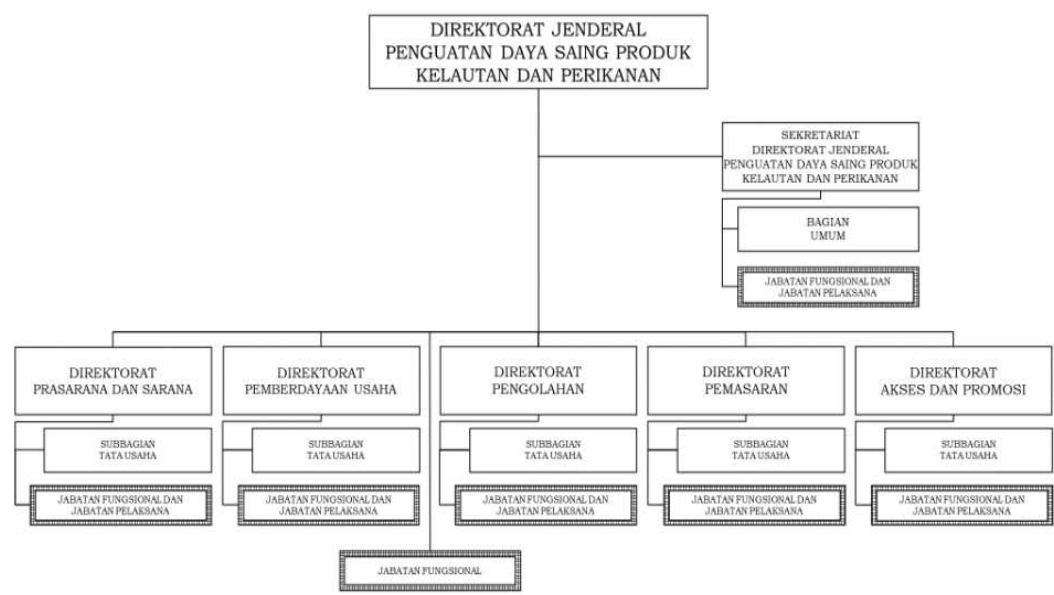
- a. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan;
- b. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengembangan Indikasi Geografis Kelautan dan Perikanan;
- c. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Konsumsi Ikan Masyarakat;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas.

7. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merupakan perangkat organisasi Ditjen PDSPKP yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan industri penguatan daya saing kelautan dan perikanan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan Renstra KKP. Kerangka kelembagaan tersebut memiliki urgensi, diantaranya mengarahkan penataan organisasi Ditjen PDSPKP sejalan dan mendukung pencapaian target program nasional serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan penataan

unit organisasi setingkat eselon I yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Ditjen PDSPKP sesuai dengan Peraturan Menteri yang tersebut disajikan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan penguatan daya saing produk dan usaha kelautan dan perikanan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, Ditjen PDSPKP sedang berproses dalam penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui pendekatan klasifikasi dan rasionalisasi kebutuhan layanan teknis.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur UPT di lingkungan Ditjen PDSPKP sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2025–2029, serta kebutuhan faktual pelaku usaha dan industri di daerah.

Penataan kelembagaan UPT ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, antara lain perubahan kelembagaan UPT yang sudah ada, yaitu BBP3KP dan pembentukan UPT baru pada wilayah-wilayah strategis berdasarkan kriteria klasifikasi UPT yang telah disusun Ditjen PDSPKP, dengan mempertimbangkan beberapa variabel di setiap pulau besar di Indonesia.

UPT Ditjen PDSPKP mempunyai tugas meningkatkan daya saing produk, usaha, dan pemasaran kelautan dan perikanan melalui pendampingan berkelanjutan dan terintegrasi.

Dalam melaksanakan tugas, UPT Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

1. pendampingan teknis penerapan standar produk, prasarana dan sarana, serta pemasaran;

2. penyusunan bahan teknis standar mutu hasil kelautan dan perikanan dan standar lainnya;
3. pendampingan teknis penerapan GMP-SSOP, PMMT/HACCP, dan CDIB;
4. pengujian produk kelautan dan perikanan dalam rangka pembinaan dan uji terap serta penyediaan bahan acuan dan uji profisiensi;
5. penilaian kesesuaian produk kelautan dan perikanan;
6. pemeriksaan produk kelautan dan perikanan dalam rangka Sertifikasi Halal;
7. pendampingan teknik pengolahan;
8. uji terap diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah;
9. pendampingan penyusunan dokumen deskripsi Indikasi Geografis;
10. pendampingan teknis penguatan branding produk;
11. pendampingan teknis kemitraan ketersediaan bahan baku, distribusi, dan akses pasar;
12. pendampingan pembentukan dan pengembangan kelembagaan usaha;
13. pendampingan peningkatan kemampuan literasi keuangan dan pemenuhan persyaratan pembiayaan;
14. pelaksanaan inkubasi bisnis dan pendampingan teknis kepada lembaga inkubator bisnis kelautan dan perikanan;
15. pendampingan pemanfaatan prasarana dan sarana;
16. pendampingan teknis pengembangan usaha dan pemasaran ikan hias;
17. pendampingan teknis pengembangan usaha dan pemasaran garam;
18. pendampingan teknis penerapan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan;
19. uji pasar hasil kelautan dan perikanan;
20. pendampingan teknik pemasaran;
21. pengujian kalibrasi sarana;
22. pengelolaan data dan informasi daya saing produk, usaha, dan pemasaran; dan
23. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Gambaran fungsi UPT di lingkungan PDSPKP disajikan dalam infografis sebagai berikut:



Gambar 3.4. Fungsi UPT Ditjen PDSPKP

Gambar ini menampilkan model layanan terpadu dan berkelanjutan (*One Stop Service Competitiveness*) yang dirancang oleh Ditjen PDSPKP.

Model ini mengintegrasikan dua dimensi utama penguatan sektor kelautan dan perikanan, yaitu:

- a. Daya Saing Produk → berfokus pada peningkatan mutu, standar, keamanan, dan inovasi produk hasil kelautan dan perikanan.
- b. Daya Saing Usaha dan Pemasaran → berfokus pada penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, peningkatan literasi keuangan, kemitraan, serta *branding* usaha bagi pelaku di berbagai skala (mikro, kecil, menengah, dan besar).

Keduanya disatukan dalam satu sistem layanan teknis yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis data, menjadikan UPT sebagai simpul utama pelaksana kebijakan penguatan daya saing di tingkat operasional.

Sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan fungsi UPT Daya Saing Produk dan Usaha Kelautan dan Perikanan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas unit di lingkungan Ditjen PDSPKP serta kerja sama dengan unit teknis lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait. UPT berperan sebagai simpul penghubung di lapangan. Kolaborasi ini mencakup integrasi program dan data dengan unit eselon II lingkup PDSPKP, sinergi implementasi teknis dengan DJPT, DJPB, DJPSDKP, dan DJPRL, serta kemitraan strategis dengan kementerian lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, BSN, dan BRIN.

Selain itu, peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam mendukung pelaksanaan program pendampingan, fasilitasi izin usaha, pengembangan

infrastruktur, serta penyerapan hasil produksi di tingkat lokal. Melalui sinergi dan kolaborasi multi-pihak ini, pelaksanaan penguatan daya saing produk dan usaha kelautan dan perikanan dapat berlangsung secara selaras, efisien, dan berkelanjutan hingga ke tingkat daerah.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan ketercapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan Ditjen PDSPKP. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome/impact* dari satu atau beberapa program yang dilakukan Ditjen PDSPKP. Untuk program pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025–2029, indikator sasarannya disajikan pada Gambar 4.1. Selanjutnya Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ditjen PDSPKP (Level 0) tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 4.1. dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis selama lima ke depan (tahun 2025–2029) disajikan pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4.



Gambar 4.1. Indikator sasaran program pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Level 0) Ditjen PDSPKP tahun 2025–2029

RPJMN 2025–2029	LEVEL 0						
KEGIATAN PRIORITAS	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	2025	2026	2027	2028	2029
KP: Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA	SS 3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,25	6,7	7,2	7,8	8,5
KP: Penganekarag aman Konsumsi Pangan	Domestik dan Internasional	Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/ tahun)	26,26	26,85	27,44	28,04	28,63
	SS 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Ditjen PDSPKP tahun 2025–2029 pada Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA

No	Sasaran dan Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis (SS): Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional						
1.	Indikator SS: Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,25	6,7	7,2	7,8	8,5

No	Sasaran dan Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Program (SP): Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing						
1.	Indikator SP1: Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Juta)	574	647	714	807	898
2.	Indikator SP2: Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar)	5,68	6,05	6,49	6,99	7,60
Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya Pangsa Pasar Produk Olahan Rumput Laut						
1.	Indikator SK1: Proporsi Ekspor Produk Olahan Rumput Laut (%)	46,5	49,9	53,5	57,4	61,3
Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya Akses dan Promosi Kelautan dan Perikanan di Luar Negeri						
2.	Indikator SK2: Pertumbuhan Ekspor Produk Perikanan (%)	4,23	6,64	7,15	7,82	8,71
Sasaran Kegiatan (SK): Terkendalnya neraca perdagangan hasil perikanan						
3.	Indikator SK3: Proporsi Nilai Impor Terhadap Ekspor Hasil Perikanan (%)	<20	<20	<20	<20	<20
Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan						
4.	Indikator SK4: Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%)	68,70	68,90	69,10	69,30	69,50
Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya Investasi Kelautan dan Perikanan						

No	Sasaran dan Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
5.	Indikator SK5: Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp Triliun)	13,11	14,47	15,84	17,21	18,58
Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya ketertelusuran dan logistik ikan						
6.	Indikator SK6: Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (%)	27,2	29,4	35,1	39,8	41,6

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Ditjen PDSPKP tahun 2025-2029 pada penganekaragaman konsumsi pangan

No	Sasaran dan Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis (SS): Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional						
1.	Indikator SS: Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)	26,26	26,85	27,44	28,04	28,63
Sasaran Program (SP): Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing						
1.	Indikator SP1: Nilai Pemasaran Produk Perikanan dalam Negeri (Rp Triliun)	310,51	320,8	331,16	341,56	352,01
2.	Indikator SP2: Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas (%)	5,00	5,55	6,00	6,50	7,00
Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya Kontribusi Protein Ikan dalam Pemenuhan Protein Hewani						

No	Sasaran dan Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Indikator SK1: Kontribusi Protein Ikan terhadap Sumber Protein Hewani (%)	53	53,15	53,30	53,45	53,60
Sasaran Kegiatan (SK): Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Berdasar Preferensi Konsumen						
2	Indikator SK2: Persentase Provinsi yang Terpetakan Preferensi Konsumennya (%)	100	100	100	100	100
Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan						
3	Indikator SK3: Volume Produksi Olahan Perikanan (juta ton)	3,71	3,83	4,05	4,16	4,37
Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Logistik						
4	Indikator SK4: Persentase Pemanfaatan Prasarana Sarana Logistik (%)	80	82	84	87	90
Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Pengujian						
5	Indikator SK5: Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (%)	70	75	80	85	90
Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas						
6	Indikator SK6: Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkat Omsetnya (%)	5	5,5	6	6,5	7

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Ditjen PDSPKP tahun 2025–2029 pada Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas

No	Sasaran dan Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis (SS): Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas						
1.	Indikator SS: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25
Sasaran Program (SP): Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan						
1.	Indikator SP1: Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP	86	86,5	87	87,5	88
Sasaran Kegiatan (SK): Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan						
1	Indikator SK1: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	85	86	87	88	89
2	Indikator SK2: Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
3	Indikator SK3: Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	81	82	83	84	85
4	Indikator SK4: Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	76	77	78	79	80

No	Sasaran dan Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
5	Indikator SK5: Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	86	86,2	86,4	86,6	86,8
6	Indikator SK6: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	92	92,1	92,15	92,2	92,25
7	Indikator SK7: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	81,5	81,75	82	82,25	82,5
8	Indikator SK8: Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
9	Indikator SK9: Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	81	81,5	82	82,5	83
10	Indikator SK10: Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100	100	100
11	Indikator SK11: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	80	81	82	83	84
12	Indikator SK12: Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	76	77	78	79	80
13	Indikator SK13: Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2	65	85	85	85	85

No	Sasaran dan Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
	dan 3 serta SOP Lingkup Ditjen PDSPKP (%)					
14	Indikator SK14: Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	77	78	79	80	81
15	Indikator SK15: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	91	92	93	94	95
16	Indikator SK16: Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Ditjen PDSPKP (Layanan)	12	12	12	12	12
17	Indikator SK17: Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	100	100	100	100	100
18	Indikator SK18: Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (%)	80	80	80	80	80
19	Indikator SK19: Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5

2. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Ditjen PDSPKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja Direktorat Jenderal yang merupakan sasaran kinerja program yang akuntabilitasnya berkaitan dengan Ditjen PDSPKP sebagai unit organisasi K/L setingkat Eselon I A. Indikator Kinerja Sasaran Program Ditjen PDSPKP (Level 1) tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1., sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Program tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 serta Tabel 4.4.

3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*) yang dilakukan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja Direktorat Jenderal merupakan sasaran kinerja kegiatan yang akuntabilitasnya berkaitan dengan unit organisasi setingkat eselon II di Ditjen PDSPKP, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4.

4. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan sesuai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pendanaan tersebut akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan, non perbankan, dan masyarakat serta pendanaan lainnya yang diatur oleh peraturan.

Ditjen PDSPKP akan berupaya menggunakan pendanaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu fokus pada kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Hal ini karena pendanaan APBN yang digunakan, berasal dari pajak yang disetor oleh rakyat. Penguatan pendanaan juga akan dilakukan dengan K/L terkait dan PDA (pendanaan APBD) yang membangun sinergi dengan Ditjen PDSPKP. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan. Secara terinci kerangka pendanaan Ditjen PDSPKP menurut program dan kegiatan untuk tahun 2025–2029 disajikan pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 2025–2029.

BAB V

PENUTUP

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, KKP menyusun Renstra KKP tahun 2025–2029. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan dan strategi sektoral yang bersifat indikatif dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan berlaku. Setiap program dan kegiatan yang ditetapkan harus mampu memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat kelautan dan perikanan untuk mendukung tercapainya visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Untuk memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, KKP akan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Renstra KKP. Evaluasi pelaksanaan Renstra KKP dilakukan untuk:

- a. menilai kinerja SS, sasaran program, dan sasaran kegiatan;
- b. mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja program dan kegiatan;
- c. menelaah penerapan manajemen risiko pembangunan nasional; dan
- d. menilai penerapan pembiayaan inovatif pemerintah dan pembiayaan non-pemerintah.

Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang indikatif dan disusun untuk menjabarkan RPJPN tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, dan Renstra KKP Tahun 2025–2029. Ditjen PDSPKP ini telah mengakomodir Visi dan Misi Presiden dan dalam penyusunannya juga memperhatikan sinkronisasi indikator yang digunakan.

Dengan demikian, pelaksanaan Renstra Ditjen PDSPKP ini diharapkan menjadi instrumen yang tidak hanya mengarahkan kebijakan dan program, tetapi juga memastikan bahwa capaian kinerja Ditjen PDSPKP dalam 5 (lima) tahun ke depan terukur, akuntabel, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

I. Matriks Kerangka Pendanaan Renstra 2025-2029 Ditjen PDSPKP

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	Sasaran/KRO/RO	Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
DITJEN PDSPKP									255.260	555.987	662.590	724.955	829.341
Sasaran Strategis 3.													
Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional		Nilai Ekspor Hasil Perikanan	USD Miliar	6,25	6,7	7,2	7,8	8,5					
		Konsumsi Ikan Masyarakat	kg/kapita/tahun	26,26	26,85	27,44	28,04	28,63					
Sasaran Strategis 5.													
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP	Nilai	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25					
Program													
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri													
	Sasaran Program												

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing		01-Nilai Ekspor Rumput Laut	Juta USD	574,00	647,00	714,00	807,00	898,00					
			02-Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya	USD Miliar	5,68	6,05	6,49	6,99	7,6					
			03-Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri	Rp Triliun	310,51	320,8	331,16	341,56	352,01					
			04-Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas	Persen	5	5,5	6	6,5	7					
	2357-Pemasaran, Akses dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan									86.845	68.477	76.877	85.102	108.773
	01-Meningkatnya Pangsa Pasar Produk Olahan Rumput Laut													
			01-Proporsi Ekspor Produk Olahan Rumput Laut	Persen	46,5	49,9	53,5	57,4	61,3					
	02-Meningkatnya Akses dan Promosi KP di Luar Negeri													
			01-Pertumbuhan Ekspor Produk Perikanan	Persen	4,23	6,64	7,15	7,82	8,71					
	03-Terkendalinya Neraca Perdagangan Hasil Perikanan													

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
				01-Proporsi Nilai Impor terhadap Ekspor Hasil Perikanan	Persen	<20	<20	<20	<20	<20					
		04-Meningkatnya Kontribusi Protein Ikan dalam Pemenuhan Protein Hewani													
				01-Kontribusi Protein Ikan terhadap Sumber Protein Hewani	Persen	53	53,15	53,3	53,45	53,6					
		05-Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sektor KP Berdasar Preferensi Konsumen													
				01-Persentase Provinsi yang Terpetakan Preferensi Konsumennya	Persen	100	100	100	100	100					
		BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM													
			001-Pelaku Usaha Pemasaran yang dibina	01-Jumlah Pelaku Pasar yang dibina	UMKM	600	0	0	0	0	810	-	-	-	-
		BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
			001-Pelaku Pemasaran yang dibina	01-Jumlah Pelaku Pemasaran yang dibina	Lembaga	0	1000	1100	1200	1300		1.500	1.760	2.040	2.340

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		QMA-Data dan Informasi Publik													
			001-Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	01-Jumlah Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan	Dokumen	3	4	2	2	2	400	1.400	700	700	700
			002-Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	01-Jumlah Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan	Dokumen	3	2	2	2	2	400	700	800	900	1.070
			004-Profil Preferensi dan Perilaku Konsumen Dalam Negeri oleh Daerah	01-Jumlah Profil Preferensi dan Perilaku Konsumen Dalam Negeri oleh Daerah	Dokumen	0	38	38	38	38	-	760	760	760	950
		PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan perikanan													
			001-Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Hasil Perikanan Berbasis Mekanisme Neraca Komoditas	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Hasil Perikanan Berbasis Mekanisme Neraca Komoditas	Rekomendasi Kebijakan	0	4	4	5	5		1.000	1.000	1.200	1.200

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			004- Penanganan Hambatan Ekspor	01-Jumlah Penanganan Hambatan Ekspor	Rekomenda si Kebijakan	0	2	3	4	5	-	700	1.200	1.800	2.300
			005-Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri	51-Jumlah Kertas Posisi Runding Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri	Rekomenda si Kebijakan	2	7	7	7	7	516	1.732	2.082	2.432	2.784
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan													
			01-Sistem Informasi Pasar	01-Jumlah Sistem informasi	Sistem Informasi	0	2	2	2	2	-	1.000	1.200	1.400	1.600
		PEE Kemitraan													
			001- Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam negeri	01-Jumlah Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam negeri	kesepakata n	8	9	11	12	32	200	360	605	720	2.175
			002- Kerjasama pemasaran rumput laut	01-Jumlah Kerjasama Pemasaran Rumput Laut	kesepakata n	6	12	13	14	15	150	660	780	910	1.089
		PEH-Promosi													

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			001- Kampanye Gerakan Memasyarakat kan Makan Ikan (Gemarikan)	01-Jumlah Kampanye Gerakan Memasyarakat kan Makan Ikan (Gemarikan)	Promosi	174	190	190	190	190	31.874	32.350	35.800	39.250	42.700
			002-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh Daerah	01-Jumlah Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh Daerah	Promosi	34	38	38	38	38	3.376	2.375	3.325	4.275	5.225
			003-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	01-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional yang diikuti	Promosi	1	7	7	7	7	900	15.419	15.819	16.219	18.743
			004-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri	01-Jumlah Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri	Promosi	4	5	6	7	38	1.200	1.750	2.250	2.800	16.000
			005-Promosi produk rumput Laut Skala Internasional	01-Jumlah Promosi produk rumput Laut Skala Internasional	Promosi	1	1	2	2	2	800	2.606	4.431	4.431	4.432

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			006-Promosi usaha dan investasi KP	01-Jumlah Promosi usaha dan investasi KP	Promosi	0	5	6	6	9	-	3.500	3.500	4.200	4.200
		QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri													
			001-Eksportir Kelautan Perikanan baru yang ditumbuhkan	01-Eksportir Kelautan Perikanan baru yang ditumbuhkan	Industri	4	2	2	2	2	400	415	515	615	715
			002-Penumbuhan Eksportir Produk Rumput Laut	01-Jumlah Penumbuhan Eksportir Produk Rumput Laut	Industri	2	2	2	2	2	300	250	350	450	550
		RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
			001-Prasarana Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Prasarana Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan Yang dibangun	unit	2	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0
		PDA-Standardisasi Produk													
			001-Produk Kelautan Perikanan yang dikurasi	01-Jumlah Produk Kelautan Perikanan yang dikurasi	Produk	400	0	0	0	0	540	0	0	0	0

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		QEG-Bantuan Peralatan / Sarana													
			001-Peralatan Pemasaran	01-Jumlah Peralatan Pemasaran	Unit	5170	0	0	0	0	6.980	0	0	0	0
	2358-Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan										16.829	12.229	14.609	16.809	22.778
	01-Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan														
				01-Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	Persen	68,7	68,9	69,1	69,3	69,5					
	02-Meningkatnya produksi olahan KP														
				01-Volume Produksi Olahan Perikanan	Juta ton	3,71	3,83	4,05	4,16	4,37					
	ADA-Standardisasi Produk														
			001-Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	01-Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	Produk	4	6	7	8	9	705	2.160	2.590	3.040	3.510
			002-Penerapan SNI	01-Jumlah Penerapan SNI	Produk	0	5	6	7	8	-	1.250	1.650	2.100	2.600

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			Hasil Kelautan dan Perikanan	Hasil Kelautan dan Perikanan											
		BMA-Data dan Informasi Publik													
			002- <i>Profiling</i> Industri pengolahan Hasil Perikanan	01-Jumlah Profiling Industri pengolahan Hasil Perikanan (<i>Losses</i> dan <i>Utilitas</i>)	Data	3	7	7	7	7	400	4.450	4.700	4.950	5.200
		QDC - Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat													
			001-Masyarakat yang dibina dalam rangka pembinaan mutu dan diversifikasi	01-Masyarakat yang dibina dalam rangka pembinaan mutu dan diversifikasi	Orang	0	100	100	100	100	-	400	400	400	400
		QDG-Fasilitas dan Pembinaan UMKM													
			001-Pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah	01-Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah	UMKM	1510	400	500	500	1000	6.054	1.000	1.250	1.250	2.500

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			002-Pelaku Usaha Pengolahan Produk KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina	01-Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Produk KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina	UMKM	0	600	700	800	1400	-	1.169	1.419	1.669	3.168
		QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri													
			001 Industri Pengolahan Produk KP yang dibina	01-Jumlah Industri Pengolahan Produk KP yang dibina	Industri	1963	400	600	800	1600	2.650	800	1.200	1.600	3.200
			005-Pelaku Usaha Pengolahan Produk KP yang dibina kelayakan pengolahan atau HACCP oleh Daerah	01-Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Produk KP yang dibina kelayakan pengolahan atau HACCP oleh Daerah	Industri	0	500	700	900	1100	-	1.000	1.400	1.800	2.200
		QEG-Bantuan Peralatan / Sarana													
			001-Sarana sistem rantai dingin hasil KP	01-Jumlah Sarana sistem rantai dingin hasil KP	Unit	220	0	0	0	0	2.046	0	0	0	0
			002-Sarana Pengolahan Hasil KP	01-Jumlah Sarana Pengolahan Hasil KP	Unit	165	0	0	0	0	4.975	0	0	0	0

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	5279-Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan										5.300	11.452	13.922	16.832	20.932
		01-Meningkatnya produk KP yang memenuhi standar pengujian													
				01-Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang memenuhi persyaratan standar pengujian	Persen	70	75	80	85	90					
		ADA-Standardisasi Produk													
			001-Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Kelautan dan Perikanan yang Disediakan	Produk	7	0	0	0	0	122	-	-	-	-
			002-Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	01-Jumlah Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	Produk	162	100	110	120	130	250	2.500	2.970	3.600	4.550

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			003-Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji	01-Jumlah Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji	Produk	250	200	250	300	350	525	1.500	2.000	2.700	3.500
			004-Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk KP yang disediakan dalam ruang lingkup layanan	01-Jumlah SNI Produk KP yang disediakan dalam ruang lingkup layanan	Produk	0	26	27	28	29	-	1.262	1.502	1.862	2.462
		AEF-Sosialisasi dan Diseminasi													
			001-Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Masyarakat yang Menerima Diseminasi dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	Orang	1000	1500	2000	2500	3000	300	1.800	2.400	3.000	3.600
		DDA-Penelitian dan Pengembangan Produk													
			001-Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai	01-Jumlah Produk Kelautan dan Perikanan	Produk	12	12	14	16	18	300	1.440	2.100	2.720	3.600

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			Tambah yang Diterapkan	Bernilai Tambah yang Diterapkan											
		QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM													
			001-UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis	01-Jumlah pelaku usaha yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis	UMKM	18	18	18	18	28	450	450	450	450	720
		QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha													
			001-Badan Usaha yang Difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk	01-Jumlah Badan Usaha yang Difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk di Gudang Beku	Badan Usaha	15	0	0	0	0	361	-	-	-	-
		RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
			001-Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	01-Jumlah Sarana Pendukung	Unit	200	0	0	0	0	1.992	-	-	-	-

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
				Operasional Gudang Beku											
			002-Sarana Laboratorium Pengujian Produk Perikanan, Garam dan Rumput Laut	01-Jumlah Sarana Laboratorium Pengujian Produk Perikanan, Garam dan Rumput Laut	Unit		2	2	2	2		2.500	2.500	2.500	2.500
		RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
			001-Prasarana Pendukung Operasional Gudang Beku	01-Jumlah Prasarana Pendukung Operasional Gudang Beku	Unit	1	0	0	0	0	1.000	-	-	-	-
	7025-Pengelolaan Prasarana dan Sarana Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan										5.857	270.052	355.718	392.931	451.586
		01-Meningkatnya ketertelusuran dan logistik ikan													
				01-Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan	Persen	27,2	29,4	35,1	39,8	41,6					

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		02-Meningkatnya pemanfaatan prasarana dan sarana Logistik													
				01-Persentase pemanfaatan prasarana sarana logistik	Persen	80	82	84	87	90					
		ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan													
			001-Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok	Rekomendasi Kebijakan	2	12	15	15	15	400	2.400	3.150	3.300	3.450
		BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
			001-Kelembagaan pengelola logistik di daerah	01-Jumlah lembaga pengelola logistik di daerah (lembaga)	Lembaga	0	38	38	38	38	-	4.180	4.560	4.940	5.320
		BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM													
			001-Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka Penguatan Sistem Logistik	01-Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka penguatan sistem logistik	UMKM	357	1250	1690	1740	1833	482	2.000	2.873	3.132	3.483
		BMA-Data dan Informasi Publik													

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			001-Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	01-Jumlah Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	Data	3	8	8	8	8	600	2.880	2.880	2.880	2.880
		QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
			001-Pengelola gudang yang difasilitasi resi gudang	01-Jumlah Pengelola gudang yang difasilitasi resi gudang	Lembaga	0	20	30	40	50		600	900	1.200	1.500
		QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha													
			001-Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional	01-Jumlah Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional	Badan Usaha	36	59	85	130	190	450	797	1.190	1.885	2.850
			002-Badan Usaha yang Difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk	01-Jumlah Badan Usaha yang Difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk di Gudang Beku	Badan Usaha	0	30	30	35	40		825	900	1.138	1.400
		PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan perikanan													

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			001-Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	01-Jumlah Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	Rekomenda si Kebijakan	2	0	0	0	0	500				
		QEG-Bantuan Peralatan / Sarana													
			001-Sarana Penyimpanan Produk KP	01-Jumlah Sarana Penyimpanan Produk KP	Unit	1	0	0	0	0	2.300				
		RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
			001-Prasarana Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Prasarana Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan Yang dibangun	unit	0	5	5	5	6		25.000	27.500	33.500	40.000
			002-Pembangunan Prasarana Penyimpanan Produk Kelautan dan Perikanan	01-Pembangunan Prasarana Penyimpanan Produk Kelautan dan Perikanan	Unit	0	3	5	5	5	-	57.125	86.125	87.625	89.125

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			003-Prasarana Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Prasarana Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan	Unit	0	6	8	8	8	-	65.000	101.000	106.000	117.000
			004-Prasarana Pendukung Operasional Gudang Beku	01-Jumlah Prasarana Pendukung Operasional Gudang Beku	Unit	0	1	1	1	1		1.100	1.200	1.300	1.400
		RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
			001-Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	01-Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	Unit	0	300	400	500	600		3.000	4.200	5.500	6.900
			002-Sarana Penyimpanan Produk KP	01-Jumlah Sarana Penyimpanan Produk KP	Unit	0	6	6	8	14		13.800	13.800	18.400	32.200
			003-Sarana Distribusi Logistik Produk KP	01-Jumlah Sarana Distribusi Logistik Produk KP	Unit	0	17	20	23	32	-	16.320	19.400	22.100	30.500
			004-Sarana Pemasaran Hasil KP	01-Jumlah Sarana Pemasaran Hasil KP	Unit	0	6716	7218	7718	8218		18.013	21.454	23.074	24.795

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			005-Sarana Penanganan dan Pengolahan Hasil KP	01-Jumlah Sarana Penanganan dan Pengolahan Hasil KP	Unit	0	600	635	710	785		44.492	46.996	53.538	60.273
		ADA-Standardisasi Produk													
			001-Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) prasarana dan sarana logistik	01-Jumlah Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) prasarana dan sarana logistik	Produk	0	7	7	9	9	-	2.520	2.590	3.420	3.510
		RBO-Prasarana Pengembangan Kawasan													
			001-Prasarana Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Prasarana Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan yang dikembangkan	Bidang	0	1	1	1	2		10.000	15.000	20.000	25.000
		AEE-Kemitraan													
			002-Kemitraan dalam rangka Pengadaan,	01-Jumlah Kemitraan dalam rangka pengadaan,	Kesepakatan	45	0	0	0	0	1.125				

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			Distribusi dan Penyimpanan	distribusi dan penyimpanan											
	7026-Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan										12.619	22.132	25.063	28.771	32.548
		01-Meningkatnya Investasi Kelautan dan Perikanan													
				01-Nilai Investasi KP	Rp Triliun	13,11	14,47	15,84	17,21	18,58					
		02-Meningkatnya UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas													
				01-Persentase UMKM Pengolahan Produk KP yang meningkat omsetnya	Persen	5	5,5	6	6,5	7					
		ACD-Perizinan Lembaga													
			001-Pelaku usaha yang difasilitasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran	01-Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran	Badan Usaha	25	0	0	0	0	375				
		PEH-Promosi													

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			001 Promosi usaha dan investasi KP	01-Jumlah Promosi usaha dan investasi KP	Promosi	2	0	0	0	0	1.400				
		QDC - Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat													
			001 - Masyarakat yang dibina dalam rangka menjadi wirausaha KP	01-Jumlah Masyarakat yang dibina dalam rangka menjadi wirausaha KP	Orang	0	500	500	500	500	-	500	500	500	500
		QDB-Fasilitas dan Pembinaan Lembaga													
			001- Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usaha	01-Jumlah lembaga usaha yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usaha	Lembaga	22	37	42	47	52	440	740	840	940	1.040
			002- Lembaga inkubator mina bisnis yang ditumbuhkan dan/atau dibina	01-Jumlah inkubator mina bisnis yang ditumbuhkan dan/atau dibina	Lembaga	0	2	3	4	5	-	750	1.250	1.750	2.250
		QDG-Fasilitas dan Pembinaan UMKM													
			001-UMKM KP yang difasilitasi akses	01-Jumlah UMKM KP yang difasilitasi	UMKM	327	0	0	0	0	654	-	-	-	-

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			pembiayaan dan kemitraan usaha	akses pembiayaan dan/atau kemitraan usaha											
			002-Wirusaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	01-Jumlah Wirusaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	UMKM	875	400	450	500	1000	6.150	1.225	1.600	2.025	2.500
			003-UMKM yang diberdayakan dan dibina menuju UMKM Naik Kelas oleh Daerah	01-Jumlah UMKM yang diberdayakan dan dibina menuju UMKM Naik Kelas oleh Daerah	UMKM	0	380	418	418	456	-	4.180	4.560	4.940	5.320
			004-UMKM KP yang difasilitas literasi keuangan dan akses pembiayaan	01-Jumlah UMKM KP yang difasilitas literasi keuangan dan akses pembiayaan	UMKM	0	450	600	750	900	-	900	1.200	1.500	1.800
		RBO-Prasarana Pengembangan Kawasan													
			001-Prasarana Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan	01-Jumlah Prasarana Kawasan Hilirisasi Kelautan dan	Kawasan	1	0	0	0	0	3.600				

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
				Perikanan yang dikembangkan											
		BAC-Pelayanan Publik kepada Badan Usaha													
			001-Pelaku usaha yang difasilitasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran	01-Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran	Badan Usaha	0	35	45	55	65	-	1.050	1.350	1.650	1.950
			002-Pelaku usaha yang didampingi dalam rangka realisasi investasi	01-Jumlah Pelaku usaha yang didampingi dalam rangka realisasi investasi	Badan Usaha	0	35	45	55	65	-	1.400	1.800	2.200	2.600
		ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan													
			001-Rekomendasi Kebijakan pemberdayaan usaha dan investasi	01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan pemberdayaan usaha dan investasi	Rekomendasi Kebijakan	0	6	6	6	6	-	7.200	7.560	7.938	8.335

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		AEE-Kemitraan													
			001-Kemitraan usaha hasil kelautan dan perikanan	01-Jumlah Kemitraan usaha hasil kelautan dan perikanan	Kesepakatan	0	50	60	70	80	-	1.250	1.500	1.750	2.000
		PDA-Standardisasi Produk													
			001-Produk Kelautan Perikanan yang dikurasi	01-Jumlah Produk Kelautan Perikanan yang dikurasi	Produk	0	1650	2150	2650	3150		2.937	2.903	3.578	4.253
Program															
Dukungan Manajemen															
		11-Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel Ditjen PDSPKP													
				01-Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP	Nilai	86	86,5	87	87,5	88					
	2361-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan										127.809	169.544	177.101	185.210	193.425
		01-Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan													

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
				01-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Persen	85	86	87	88	89					
				02-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Persen	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5					
				03-Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/ Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Persen	81	82	83	84	85					

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
				04-Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Nilai	76	77	78	79	80					
				05-Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	Nilai	86	86,2	86,4	86,6	86,8					
				06-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	Nilai	92	92,1	92,15	92,2	92,25					
				07-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP	Nilai	81,5	81,75	82	82,25	82,5					
				08-Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Ditjen PDSPKP	Nilai	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9					

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
				09-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP	indeks	81	81,5	82	82,5	83					
				10-Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Persen	100	100	100	100	100					
				11-Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup Ditjen PDSPKP	Nilai	80	81	82	83	84					
				12-Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Ditjen PDSPKP	Persen	76	77	78	79	80					

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
				13-Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Ditjen PDSPKP	Persen	65	85	85	85	85					
				14-Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP	Nilai	77	78	79	80	81					
				15-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP	Persen	91	92	93	94	95					
				16-Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Ditjen PDSPKP	Layanan	12	12	12	12	12					
				17-Persentase penyelesaian permasalahan hukum lingkup Ditjen PDSPKP	Persen	100	100	100	100	100					
				18-Persentase Dokumen Kerja Sama	Persen	80	80	80	80	80					

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
				yang disusun/ditin daklanjuti oleh Ditjen PDSPKP											
				19-Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	Persen	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5					
		AEC-Kerja sama													
			001-Layanan Kerja Sama Ditjen PDSPKP	05-Terlaksananya Layanan Kerja Sama	Dokumen	2	2	2	2	2	898	2.200	2.600	3.000	3.500
		CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
			051-Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	01-Tersedianya Perangkat Pengolah Data	Unit	0	52	75	98	120	-	700	950	1.200	1.500

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			Ditjen PDSPKP yang disediakan	dan Komunikasi Lingkup Ditjen PDSPKP											
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													
			956-Layanan Bantuan Hukum	01- Terlaksananya Layanan Bantuan Hukum	Dokumen	10	10	10	10	10	210	310	410	510	992
			957-Layanan Hukum	01- Terlaksananya Layanan Hukum lingkup Ditjen PDSPKP	Layanan	5	1	1	1	1	1.200	1.440	1.440	1.440	1.440
			958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	01- Terlaksananya Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	4	4	4	4	4	1.559	1.832	1.832	1.832	1.832
			960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01- Terlaksananya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	1	1	800	1.500	1.800	2.100	2.200
			962-Layanan Umum	01- Terlaksananya Layanan Umum	Layanan	2	2	2	2	2	3.991	9.250	9.350	9.450	9.450

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			963-Layanan Data dan Informasi	01- Terlaksananya Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	39	39	39	39	2.000	13.620	14.772	15.932	16.160
			994-Layanan Perkantoran	01- Terlaksananya Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	2	2	2	106.621	120.074	124.486	129.258	135.000
		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
			951-Layanan Sarana Internal	01- Terlaksananya Layanan Sarana Internal	Layanan	0	210	210	210	210	-	630	785	940	1.100
		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal													
			954-Layanan Manajemen SDM	01- Terlaksananya Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	0	0	0	0	800	0	0	0	0
			954-Layanan Manajemen SDM	01- Terlaksananya Layanan Manajemen SDM	Orang		550	550	550	550	-	2.310	2.310	2.310	2.310
		EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal													
			952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01- Terlaksananya Layanan Perencanaan	Dokumen	45	45	45	45	45	4.800	5.028	5.116	5.203	5.441

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN		Sasaran/KRO/RO		Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp. Juta Rupiah)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
				dan Penganggaran											
			953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01- Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	5	5	5	5	5	1.110	1.200	1.200	1.200	1.250
			955-Layanan Manajemen Keuangan	01- Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	2	0	0	0	0	1.630	-	-	-	-
			955-Layanan Manajemen Keuangan	01- Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	0	10	10	10	10	-	2.250	2.500	2.850	3.000
			956-Layanan Barang Milik Negera	05- Terlaksananya Layanan Barang Milik Negera	Layanan	10	10	10	10	10	1.390	1.500	1.750	2.085	2.250
			961-Layanan Reformasi Kinerja	01- Terlaksananya Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1	0	0	0	0	800	-	-	-	-
			961-Layanan Reformasi Kinerja	01- Terlaksananya Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	0	4	4	4	4	-	5.700	5.800	5.900	6.000

II. MATRIK KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN 2025-2029

1. Peraturan Pemerintah

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
1.	Rancangan Perubahan Peraturan Peraturan 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan	Tindak lanjut pencabutan Peraturan Peraturan Nomor 9 Tahun 2018. Penyesuaian standar mutu hasil kelautan dan perikanan	a. Setditjen PDSPKP b. Direktorat Prasarana dan Sarana c. Direktorat Pengolahan	a. Kemenko Pangan b. BSN c. Kemendag d. Kemenperin e. BRIN	2025	

2. Peraturan Presiden

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	a. Meningkatkan konsumsi ikan b. Memenuhi kebutuhan gizi masyarakat c. Memperatakan konsumsi ikan d. Meningkatkan perekonomian nasional	Direktorat Pemasaran	a. Kemenko Pangan b. Badan Gizi Nasional c. Pemerintah Daerah d. Kementerian PPN/Bappenas e. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) f. Kementerian Koperasi g. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) h. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) i. Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) j. Kementerian Pariwisata k. Tentara Nasional Indonesia (TNI) l. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	2025	Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
				m. BRIN n. BPOM o. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Rencana Aksi Sistem Logistik Ikan Nasional	a. Kapasitas regulasi untuk implementasi sistem logistik ikan sekarang ini masih belum memadai dibandingkan dengan kebutuhannya. a) Peningkatan daya saing produk hasil perikanan di pasar domestik maupun global melalui penataan logistik ikan yang baik	Direktorat Prasarana dan Sarana	a. Kemenko Perekonomian b. Kemenko Pangan c. LNSW d. Kemendag e. Kemenhub f. Kominfo g. Kemenkeu	2026	

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang <i>Public Service Obligation</i> pada Logistik Ikan Nasional (Pengangkutan)	a. Menjamin distribusi ikan yang merata dari pusat-pusat produksi ke konsumen atau industri pengolahan ikan b. Mengendalikan fluktuasi harga ikan pada saat panen dan panceklik c. Memastikan ketersediaan ikan secara kontinu untuk kebutuhan konsumsi masyarakat maupun untuk kebutuhan pengolahan hasil perikanan	Direktorat Prasarana dan Sarana	a. Kemenko Perekonomian b. LNSW c. Kemendag d. Kemenhub e. Kemenkeu	2027	

3. Peraturan Menteri

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan	a. Mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi b. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha c. Fasilitasi akses pembiayaan usaha d. Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh prasarana dan sarana usaha kelautan dan perikanan	Direktorat Pemberdayaan Usaha	a. Kementerian UMKM b. Kementerian bidang Perekonomian c. Asosiasi Perikanan	2025	
2	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengembangan Indikasi Geografis Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan ragam produk kelautan dan perikanan berlabel indikasi geografis dalam rangka mendukung akselerasi hilirisasi perikanan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Direktorat Pengolahan	a. Kementerian Hukum b. Pemerintah Daerah c. Akademisi	2025	
3	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Angka konsumsi Ikan	Dasar penghitungan Angka Konsumsi Ikan	Direktorat Pemasaran	Kemenko Bidang Pangan	2026	

NO	KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
4	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pemasaran	a. Tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 b. Pedoman pemasaran dalam negeri c. Standar pemasaran dalam negeri	a. Direktorat Akses dan Promosi b. Direktorat Pemasaran	a. Kementerian Perdagangan b. Kementerian Perindustrian c. BSN	2027	
5	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas	Penyesuaian neraca komoditas pangan	a. Direktorat Pemasaran b. Direktorat Prasarana Sarana dan	a. Kementerian Keuangan b. Kementerian Perdagangan c. Kementerian Perindustrian d. Badan Karantina Indonesia	2026	

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

MACHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Machmud

